

RENCANA AKSI DAERAH SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S (SDG's)



Disusun Oleh :

BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penyusunan Rencana Aksi Daerah *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu tertentu. SDG's merupakan agenda pembangunan dunia atau lintas dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi, diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu MDG's (millennium Development Goal's) sebagai tujuan bersama sampai tahun 2030 dan disepakati oleh berbagai Negara dalam forum Perserikatan Bangsa-bangsa.

Dalam mendukung Program SDG's di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten Kota) diharuskan untuk menyusun Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi daerah SDG's paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan.

Rencana Aksi Daerah (RAD) ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan RPJMN tahun 2015-2019.

Rencana Aksi daerah (RAD) SDG's Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat terutama dalam penyusunan perencanaan lintas sektoral di perangkat daerah.



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan RPJMD	1
B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menyempurnakan Milenium Development Goals	5
C. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB di Daerah	6
D. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB	14
E. Pembiayaan TPB di Daerah	16
F. Metodologi Penyusunan RAD TPB	16
G. Sistematika RAD TPB	17
BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB	19
A. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun	19
1. Persentase Penduduk Miskin	20
2. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kep. Bangka Belitung	23
3. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kep. Bangka Belitung	24
4. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kep. Bangka Belitung	25

5. Tingkat Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan	26
6. Tantangan pelaksanaan TPB	26
B. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang baik, serta meningkatkan Pertanian berkelanjutan	26
C. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	33
D. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk semua	38
1. Angka Harapan Lama Sekolah	39
2. Angka Rata-rata Lama Sekolah	40
E. Mencapai Kesetaraan Gender pada Kaun Perempuan	41
F. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak	47
G. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan modern	47
1. Rasio Elektrifikasi	47
2. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	48
3. Konservasi Energi	50
H. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan	50
I. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	57
J. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar Negara	59
1. Koefisien Gini	59
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis Kemiskinan	59
K. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	61
L. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	63
M. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan bencana	65
N. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	66
O. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	68
P. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan membangun Kelembagaan yang tangguh	70
Q. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	71
BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB	73
A. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	73

B.	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	75
C.	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	78
D.	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	81
E.	Tujuan 5 Kesetaraan Gender	83
F.	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	85
G.	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	87
H.	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	88
I.	Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	92
J.	Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	94
K.	Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	95
L.	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab	97
M.	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	98
N.	Tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	99
O.	Tujuan 15 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Daratan	101
P.	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Tangguh	102
Q.	Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan	105
 BAB IV. PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN		106
A.	Landasan Peraturan	106
B.	Mekanisme Pemantauan RAD	107
C.	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pihak Non Pemerintah	109
D.	Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian SDG's 2017-2022	109
 BAB V. PENUTUP		111

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Keterkaitan Isu-isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tujuan pembangunan Berkelanjutan	3
Tabel 1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022	8
Tabel 1.3 Target Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11
Tabel 1.4 Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12
Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 -2017	20
Tabel 2.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	20
Tabel 2.3 Daftar Komoditi Penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017	22
Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2016-September 2017	23
Tabel 2.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	24
Tabel 2.6 Data Ketersediaan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	27
Tabel 2.7 Populasi Ternak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam ekor), Tahun 2013-2017	30
Tabel 2.8 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	30
Tabel 2.9 Jumlah kasus HIV dan AIDS 2013-2017	34
Tabel 2.10 Cakupan Penemuan Penderita Penyakit Demam Berdarah (DBD)	35
Tabel 2.11 Angka Prevalensi Malaria tahun 2012-2017	35
Tabel 2.12 Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 ...	37

Tabel 2.13	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2016	40
Tabel 2.14	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	41
Tabel 2.15	Rata-rata Lama sekolah Tahun 2012-2016	42
Tabel 2.16	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 s.d 2017	44
Tabel 2.17	Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) Tahun 2013 s.d 2017	46
Tabel 2.18	Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016	47
Tabel 2.19	Data Jenis Energi Baru Terbarukan yang eksisting dan dalam tahap perencanaan	48
Tabel 2.20	Konsumsi Listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (GWH)	49
Tabel 2.21	Perkembangan Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50
Tabel 2.22	Trend Lapangan Usaha dan kesempatan Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	51
Tabel 2.23	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2014-2017	52
Tabel 2.24	Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2013 -2017.....	55
Tabel 2.25	Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	55
Tabel 2.26	Nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013-2017 (juta rupiah)	56
Tabel 2.27	Penduduk Bekerja Menurut Pada Sektor Industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017	57
Tabel 2.28	Tingkat Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2013-2017	59
Tabel 2.29	Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	60
Tabel 2.30	Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	61
Tabel 2.31	Kriteria dan Indikator IKLH	62
Tabel 2.32	Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 - 2017	66
Tabel 2.33	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 - 2017	67

Tabel 3.1	Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	72
Tabel 3.2	Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	75
Tabel 3.3	Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	78
Tabel 3.4	Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	81
Tabel 3.5	Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kestaraan Gender	83
Tabel 3.6	Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanita Layak	85
Tabel 3.7	Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	86
Tabel 3.8	Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	89
Tabel 3.9	Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	91
Tabel 3.10	Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	93
Tabel 3.11	Target Pencapaian Indikator Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	94
Tabel 3.12	Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	96
Tabel 3.13	Target Pencapaian Indikator Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim	97
Tabel 3.14	Target Pencapaian Indikator Tujuan 14. Ekosistem Lautan	98
Tabel 3.15	Target Indikator Tujuan 15. Ekosistem Daratan	100
Tabel 3.16	Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	101
Tabel 3.17	Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai tujuan	103

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013-2017	21
Gambar 2.2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Kep. Babel 2011-2017	23
Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2008 - 2017	24
Gambar 2.4 Capaian Skor PPH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	26
Gambar 2.5 Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari Tahun 2015-2017	27
Gambar 2.6 Perkembangan Luas Lahan Sawah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	29
Gambar 2.7 Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam ton), Tahun 2013-2017	29
Gambar 2.8 Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017	31
Gambar 2.9 Persentase bayi Kurang Gizi dan Stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2017	32
Gambar 2.10 Jumlah Kematian Bayi, Balita, dan Ibu tahun 2012-2017	33
Gambar 2.11 Jumlah Kematian Bayi, Balita, dan Ibu untuk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017	34
Gambar 2.12 Capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017	36
Gambar 2.13 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017.....	38
Gambar 2.14 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017	38
Gambar 2.15 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017	39
Gambar 2.16 Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017	39
Gambar 2.17 Trend IPG dan IDG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016	40
Gambar 2.18 Persentase perkawinan berdasarkan usia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2017	42

Gambar 2.19	Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) Nasional & Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2017	52
Gambar 2.20	Upah Rata Rata pekerja per Bulan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2017	53
Gambar 2.21	Pertumbuhan Sub Sektor Lapangan Usaha Penyediaan Makan Minum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2017	55
Gambar 2.22	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ADHB 4 (empat) sektor terbesar Tahun 2013-2017	57
Gambar 2.23	Perkembangan Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013-2017	58
Gambar 2.24	Perkembangan Jumlah Orang Miskin dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013-2017	59
Gambar 2.25	Perkembangan Ekspor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2013-2017	70
Gambar 2.26	Ekspor terbesar menurut kelompok komoditi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2017	70
Gambar 4.1	Pemetaan Indikator Nasional dan Indikator Daerah dalam mendukung TPB	105
Gambar 4.2	Alur pemantauan RAD TPB/SDGs	106
Gambar 4.3	Alur Pelaporan dalam pemantauan RAD TPB/SDGs	107

Bab I Pendahuluan

Komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan komitmen negara untuk menyejahterakan rakyatnya sekaligus menyumbang pada kesejahteraan masyarakat dunia. Berkenaan dengan itu maka MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

A. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pada pasal 2 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaras dengan muatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022.

Beberapa poin TPB terdapat dalam isu-isu strategis pembangunan daerah, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun terakhir yang cenderung menurun dan berada di bawah capaian Nasional menjadi isu utama dalam pembangunan daerah terutama untuk lima tahun ke depan sesuai dengan RPJMD 2017-2022. Capaian pertumbuhan ekonomi seperti dilansir melalui website BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tahun 2012 sebesar 5,5% menurun di tahun 2014 menjadi 4,67% dan tahun 2017 menjadi 4,47%. Isu ini berkaitan dengan TPB ke-7 Energi bersih dan terjangkau, TPB ke-8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi, TPB ke-9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur dan TPB ke-10 Berkurangnya Kesenjangan.
2. Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan risiko bencana melingkupi beberapa tema TPB yaitu air bersih dan sanitasi (tujuan ke-6), penyediaan permukiman (tujuan ke-11), perubahan iklim (tujuan ke-13), pengelolaan ekosistem laut dan pengelolaan ekosistem daratan (tujuan ke-15). Isu pencemaran lingkungan berkaitan erat dengan tujuan TPB ke-6 yaitu "menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua". Salah satu jenis pencemaran, yaitu pencemaran air, dapat ditekan dengan beberapa sasaran dalam tujuan TPB ke-6. Terutama terkait penyediaan air baku, pencegahan pencemaran air yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengolahan

air limbah, peningkatan kualitas air sungai, dan pengendalian penggunaan air tanah. Isu pencemaran lingkungan dan risiko bencana juga memiliki hubungan dengan tujuan TPB ke-11 yaitu “Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan”. Sasaran tujuan TPB ke-11, yang tercakup dalam isu pencemaran lingkungan, adalah penanganan sampah dan limbah perkotaan. Sementara sasaran yang tercakup dalam isu risiko bencana yaitu penurunan indeks risiko bencana, peningkatan kapasitas masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana, dan penyediaan sistem peringatan dini. Isu risiko bencana memiliki keterkaitan dengan tujuan TPB ke-13 yaitu “mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya”, sasaran TPB terkait yaitu menurunnya indeks risiko bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana. Isu pencemaran dan kerusakan lingkungan berkaitan dengan tujuan ke-14 mengenai pengelolaan ekosistem perairan dan tujuan ke-15 tentang pengelolaan ekosistem darat. Dalam tujuan ke-14, sasarannya adalah peningkatan wilayah konservasi perairan. Untuk tujuan ke-15, sasaran-sasaran TPB bidang pengelolaan ekosistem darat yang terkait dengan isu pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan dan pengurangan luasan lahan kritis melalui rehabilitasi.

3. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian, melingkupi beberapa tujuan TPB. Isu ini berkaitan dengan tujuan TPB ke-11 dan ke-2. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang melingkupi sasaran dalam tujuan TPB ke-11 mengenai upaya menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Sasaran yang dilingkupi adalah perwujudan kota dan kawasan permukiman yang layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya. Tingginya alih fungsi lahan pertanian melingkupi sasaran tujuan TPB ke-2 terkait upaya menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Sasaran pembangunan berkelanjutan yang terkait adalah penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan isu bidang ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan TPB ke-9. Tujuan tersebut adalah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif, dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Sasaran TPB yang terlingkupi dalam isu penyediaan infrastruktur ini adalah pembangunan bandara baru.
5. Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di kisaran 4-6 % selama 5 tahun terakhir, tahun 2012 sebesar 5,37 % turun pada tahun 2014 menjadi 4,97% dan meningkat lagi pada tahun 2017 menjadi 5,30 %. Untuk sasaran penurunan angka kemiskinan Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung melalui RPJMD 2017-2022 di fokuskan kepada mempertahankan tingkat kemiskinan agar berada di bawah 5% dengan tetap mengadopsi program bantuan social dan focus menjaga masyarakat miskin yang rentan serta tetap mengendalikan tingkat inflasi yang dapat memicu kenaikan harga bahan-bahan pokok dan menurunkan belanja masyarakat. Angka kemiskinan melingkupi

dua tujuan TPB. Tujuan ke-1 yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun, dan tujuan ke-10 yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Sasaran dalam tujuan ke-1 yang tercakup dalam isu kemiskinan yaitu penurunan tingkat kemiskinan, penurunan persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan penurunan jumlah keluarga sangat miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat. Sasaran dalam tujuan ke-10 yang terkait dengan isu ini yaitu penurunan persentase penduduk miskin terutama di daerah tertinggal.

Tabel 1.1. Keterkaitan Isu-isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tujuan pembangunan Berkelanjutan

No	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
1	2	3
1	Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah	1 Energi bersih dan terjangkau (Tujuan 7)
		2 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8)
		3 Industri, Inovasi dan Infratraktur (Tujuan 9)
		4 Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10)
2	Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi	1 Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8)
		2 Industri, Inovasi dan Infrastruktur (tujuan 9)
3	Nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah	1 Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8)
4	Kemandirian Pangan Rendah	1 Tanpa Kemiskinan (tujuan 1)
		2 Tanpa Kelaparan (tujuan 2)
5	Tingginya tingkat inflasi	1 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (tujuan 12)
6	Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral belum optimal	1 Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8)
		2 Ekosistem Lautan (tujuan 14)
		3 Ekosistem Daratan (tujuan 15)
7	Hilirisasi sumber daya mineral masih rendah	1 Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8)
8	Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan	1 Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8)

No	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	4
1	2	3	
		2	Ekosistem Lautan (tujuan 14)
9	Tingkat Investasi Rendah	1	Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8)
		2	Ekosistem Lautan (tujuan 14)
10	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Kota dan permukiman berkelanjutan (tujuan 11)
11	Kebutuhan akan energi tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi	1	Energi bersih dan terjangkau (Tujuan 7)
12	Konektivitas antar pulau sebagian besar sulit dijangkau	1	Industri, Inovasi dan Infratraktur (Tujuan 9)
13	Kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi	1	Industri, Inovasi dan Infratraktur (Tujuan 9)
14	Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik	1	Industri, Inovasi dan Infratraktur (Tujuan 9)
15	Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas	1	Industri, Inovasi dan Infratraktur (Tujuan 9)
16	Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika	1	Industri, Inovasi dan Infratraktur (Tujuan 9)
17	Tingkat pendidikan SDM masih rendah	1	Pendidikan Berkualitas (Tujuan 4)
18	Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas	1	Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Tujuan 3)
19	Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah	1	Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Tujuan 3)
		2	Air bersih dan sanitasi layak (tujuan 6)
20	Pengguna narkoba dan penderita HIV AIDS meningkat	1	Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Tujuan 3)
21	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal	1	Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (Tujuan 16)
22	Kondusivitas demokrasi belum stabil	1	Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (Tujuan 16)
23	Lingkungan hidup banyak yang rusak	1	Air bersih dan sanitasi layak (tujuan 6)
		2	Kota dan permukiman berkelanjutan (tujuan 11)
		3	Penanganan perubahan iklim (tujuan 13)
		4	Ekosistem Lautan (tujuan 14)
		5	Ekosistem Daratan (tujuan 15)
24	Rawan bencana	1	Kota dan permukiman berkelanjutan (tujuan 11)

No	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	5
1	2	3	
25	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten	1 Kota dan permukiman berkelanjutan (tujuan 11)	

B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menyempurnakan *Milenium Development Goals (MDG's)*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global, merupakan transformasi yang ambisius dari *Milenium Development Goal's (MDG's)*. Sebagai contoh, Tujuan 1 MDGs tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB menjadi sebanyak 6 Tujuan meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan.

Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target Tujuan global, TPB jauh lebih ambisius karena bertujuan menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan “Tanpa Kemiskinan” dan “Tanpa Kelaparan”, akan dituntaskan hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai “*Zero Goal*”. Sebagai contoh, target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030 adalah Nol. Begitu pula target kelaparan pada Tujuan 2 tentang Tanpa Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol.

TPB juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu Tujuan 9 terkait dengan Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB telah bertransformasi menjadi 241 Indikator.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk provinsi yang berhasil mencapai hampir semua indikator MDGs dibandingkan provinsi lainnya. 36 indikator dari 41 indikator MDGs telah berhasil dicapai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada akhir tahun 2015. Enam indikator utama yang telah dicapai dalam MDGs tersebut meliputi: 1) Kemiskinan; 2) Akses pendidikan dasar; 3) Kesetaraan gender dalam pendidikan; 4) Akses terhadap air bersih dan sanitasi perkotaan, dan 5) permukiman kumuh perkotaan. Empat indikator MDGs yang belum dapat dicapai pada akhir tahun 2015 di yaitu: 1) Menurunkan Angka Kematian Bayi dan Balita; 2) Meningkatkan kesehatan Ibu; 3) *Memerangi HIV, Tuberkulosis* dan penyakit menular lainnya;

4) Jumlah emisi karbondioksida (CO₂). Pencapaian MDGs inilah yang diteruskan dalam pelaksanaan TPB.

C. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB di Daerah

Pemerintah Daerah Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk menyukseskan pencapaian TPB. Hal ini dibuktikan dengan keseriusannya dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang akan menjadi panduan pelaksanaan TPB.

Isu-isu strategis pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 selaras dengan pencapaian TPB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung sasaran tujuan pertama TPB yaitu pada tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2012 sampai dengan 2017 cenderung berfluktuatif, Persentase penduduk miskin 2012 sebesar 5,37%, turun menjadi 4,83% pada September 2015 tapi meningkat pada tahun 2017 menjadi 5,30%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan nasional, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih lebih rendah. Dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 ditargetkan tingkat kemiskinan akan berada dikisaran 5,22 % - 5,00% .

Isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait ketimpangan wilayah mendapatkan perhatian dalam TPB. Tujuan 8 secara khusus berkaitan dengan ketimpangan wilayah yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan layak bagi semua. Tujuan 10 yaitu mengurangi kesenjangan daerah, dengan sasarannya yaitu: meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya Produk Domestik

Bruto (PDB) per kapita per tahun, tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun, menurunnya koefisien gini, dan menurunnya tingkat kemiskinan.

Komposisi struktur ekonomi tiap kabupaten/kota perlu untuk dicermati karena mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi. Kabupaten Bangka, Bangka Tengah dan Bangka Selatan masih mengandalkan sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonominya. Sementara di Kabupaten Belitung penggerak utama perekonomian adalah sektor Pariwisata dan Kota Pangkalpinang penggerak utama perekonomian adalah sector jasa dan Perdagangan. Melihat perbedaan karakter tersebut, tantangan ke depan adalah menumbuhkan investasi secara proporsional dengan memperhitungkan potensi tiap daerah untuk menghilangkan kesenjangan kabupaten/kota.

Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah merupakan salah satu sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022. Dengan indikator Indeks Williamson,

tahun 2017 sebesar 0,251 dan pada tahun 2022 menjadi 0,236. Isu strategis ketimpangan wilayah diatasi dengan strategi mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru (selaras dengan TPB 8) dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian (selaras dengan TPB 9).

Isu lingkungan menjadi masalah yang terus dibicarakan mulai dari MDGs sampai dengan adanya SDGs/TPB. Dalam pelaksanaan aksi pencapaian SDGs/TPB, lingkungan menjadi pilar tersendiri. Pilar ini terdiri dari tujuan ke-6 (air bersih dan sanitasi layak), tujuan ke-11 (kota dan permukiman berkelanjutan), tujuan ke-12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan), tujuan ke-13 (penanganan perubahan iklim), tujuan ke-14 (ekosistem lautan), dan tujuan ke-15 (ekosistem daratan). Terkait hal tersebut, isu lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dianggap sangat penting sehingga menjadi salah satu indikator sasaran dalam RPJMD yaitu meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan. Dua indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi naik dari 4,11 (tahun 2017) menjadi 4,70 (tahun 2022) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) naik dari 58,59 (2017) menjadi 60,80 (tahun 2022).

Masalah pengembangan pendidikan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyelaraskannya sesuai dengan tujuan ke-4 TPB yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pendidikan merupakan sarana mewujudkan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi manusia cerdas utuh berbudaya sesuai dengan filosofi dan ajaran moral nilai luhur budaya. Adapun sarannya adalah:

1. Pada tahun 2022, terwujudnya aksesibilitas dan perluasan kesempatan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat;
2. Pada tahun 2022, terwujudnya relevansi pendidikan menengah untuk menjawab pembangunan daerah;
3. Pada tahun 2022, terwujudnya tata kelola management pendidikan yang bermutu menuju pada pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Pada tahun 2022, terwujudnya pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas.

Terkait isu tata kelola pemerintahan, menjadi bahasan dalam TPB khususnya pada tujuan ke-16. Tujuannya adalah meningkatkan perdamaian dan menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang (termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan). Skor Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2016 mencapai 63,15 yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 56,69. Pencapaian tersebut menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi terbaik dalam aspek reformasi birokrasi. Pencapaian ini membawa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai rujukan penerapan reformasi birokrasi. Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungannya serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pilar tersendiri dalam. Pilar tersebut terdiri dari 4 (empat) tujuan yaitu: energi bersih dan terjangkau (Tujuan 7), pekerjaan layak dan

pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8), industri, inovasi dan infrastruktur (Tujuan 9), berkurangnya kesenjangan (Tujuan 10).

Paradigma pembangunan ekonomi mengalami pergeseran, dari mengejar angka pertumbuhan meningkat menjadi pertumbuhan yang bersifat inklusif. Pertumbuhan inklusif dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan yang menjamin kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing-masing individu. Pertumbuhan inklusif akan memberi rakyat miskin sebuah titik awal yang memungkinkan mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Strategi pencapaian pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai melalui beberapa cara, yaitu percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan, menghilangkan ketimpangan dengan menjamin kesetaraan terhadap peluang, peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, penguatan kapasitas produksi, dan juga mewujudkan sistem perlindungan sosial.

Pertumbuhan inklusif diukur melalui *Inclusive Growth Index* (IGI) yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) Dimensi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur ekonomi; (2) Dimensi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, (3) Dimensi kesetaraan gender; (4) Dimensi kapabilitas; dan (5) Dimensi perlindungan sosial. Hasil kajian BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memuaskan tetapi belum inklusif. Berdasarkan pengukuran indeks IGI diperoleh dimensi infrastruktur ekonomi, kesetaraan gender, dan kapabilitas manusia mencapai indeks kepuasan yang relatif tinggi. Sedangkan dimensi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih relatif rendah pencapaiannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan belum diikuti dengan penurunan kesenjangan baik distribusi pendapatan antar individu maupun distribusi pendapatan antar kabupaten/kota. Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan meletakkan IGI sebagai indikator tujuan meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komitmen pelaksanaan Pencapaian TPB di atas dapat disajikan dalam skema Visi Misi Tujuan dan Sasaran pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Visi

“Babel Sejahtera, ProvinsiMaju yang Unggul di BidangInovasiAgropolitan danBaharidengan Tata KelolaPemerintahandanPelayananPublik yang EfisiendanCepatBerdasarkan Teknologi”

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah				
1	Meningkatnya	1 Persentase	1 Meningkatnya	1 Persentase pertumbuhan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	
1	2	3	4	5	
1	pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	
			2 Meningkatkan produksi sub sektor perikanan	1 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	
			3 Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	1 Tingkat kunjungan wisatawan	
			4 Meningkatkan produksi sektor pertambangan	1 Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	
			5 Meningkatkan pembangunan berbasis industri	1 Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	
			6 Terwujudnya kemandirian energi	1 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor ketenagalistrikan	
2	Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah dan pendapatan masyarakat	1 Pengeluaran pemerintah perkapita	1 Meningkatkan pendapatan pemerintah Daerah	1 Persentase Pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah	
			2 Pendapatan perkapita masyarakat	1 Menurunnya angka Pengangguran	1 Persentase Angka Pengangguran
				2 Menurunnya angka kemiskinan	1 Persentase Angka Kemiskinan
				3 Menurunnya angka Inflasi	1 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
				4 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1 Persentase laju pertumbuhan Penduduk
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas					
3	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas	1 Pertumbuhan sub sektor jasa konstruksi	1 Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah;	1 Persentase Luas Daerah irigasi (ha)	
			2 Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	2 Ketersediaan air baku (m3)	
				1 Persentase lingkungan yang tertata	
2 Persentase bangunan yang tertata					
3 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi					

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
			3 Meningkatkan konektivitas antar wilayah	1 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut 2 Persentase armada pengangkutan 3 Persentase jalan kondisi mantap
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal				
4	Meningkatnya Lama sekolah masyarakat	1 Rata-rata lama sekolah (Rata-rata lama sekolah gabungan, rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	1 Meningkatkan pendidikan bagi masyarakat	1 Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat				
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup (Angka Usia Harapan Hidup gabungan, Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	1. Meningkatkan kesehatan masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi				
6	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	1 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi	1 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan 2 Tingkat kematangan Maturitas SPIP 3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi 4 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
			2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	1 Indeks Profesionalitas ASN
			3 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	1 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2 Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
7	Terwujudnya Pembangunan Demokrasi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	1 Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	1 Skor aspek kebebasan sipil 1 Skor aspek hak-hak politik 1 Skor aspek lembaga demokrasi
Misi VI . Ppengendalian bencana dankualitas lingkungan hidup				
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	1 Indeks Resiko Bencana	1 Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	1 Indeks kapasitas Bencana Daerah
9	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	1 Indeks kualitas air sungai 2 Indeks kualitas udara 3 Indeks tutupan lahan 4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Tabel 1.3
Target Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2017-2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB	4,11	4,30	4,40	4,50	4,60	4,70	4,70
2	Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah dan pendapatan masyarakat	Pengeluaran pemerintah perkapita,(dalam ribuan)	1.864	1.890	1.940	1.980	2.020	2.060	2.060
		Pendapatan perkapita masyarakat, (dalam ribuan)	46.457	50.732	53.015	55.401	57.894	60.499	60.499
3	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi	6,90	6,95	7,00	7,10	7,20	7,30	7,30
4	Meningkatnya Lama sekolah masyarakat	Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	7,68 L=8,90 P=7,76	7,76 L = 7,90 P=6,76	7,83 L= 7,94 P = 6,98	7,89 L = 7,96 P = 6,99	7,92 L = 7,98 P = 7,00	8,00 L= 8,00 P = 7,05	8,00 L= 8,00 P = 8,10
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup)	69,97 L=68,17	69,98 L = 68,24	70,16 L = 68,37	70,23 L = 68,40	70,36 L = 68,50	70,48 L = 68,60	70,48 L = 68,60

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perempuan)	P=71,96	P = 72,00	P = 72,12	P = 72,23	P = 72,30	P = 72,45	P = 72,45
6	Mewujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	63,15	64.08	65.39	67.41	68.43	69.50	69.50
7	Terwujudnya pembangunan demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	83,10	74,77	75,24	75,65	75,83	76,00	76,00
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	162	159	156	153	150	147	147
9	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,59	58,76	59,32	59,81	60,37	60,80	60,80

Tabel 1.4
Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2017-2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	1 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,76	4,80	4,90	5,00	5,10	5,15	5,15
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	2 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	3,74	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	4,00
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	3 Tingkat kunjungan wisatawan	330.322	389.009	389.009	419.594	448.937	477.181	477.181
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	5 Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,49	0,53	0,57	0,63	0,67	0,73	0,73
5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	6 Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	2,62	2,63	2,65	2,67	2,82	2,86	2,86
6	Terwujudnya kemandirian energi	7 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan	15,35	12,80	12,83	12,86	12,87	12,95	12,95
7	Meningkatnya pendapatan pemerintah Daerah	8 Persentase Pertumbuhan pendapatan pemerintah	5,50	5,6	5,65	5,70	5,75	5,80	5,80

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		daerah							
8	Menurunnya angka Pengangguran	9 Persentase Angka Pengangguran	3,7	5,70	5,60	5,50	5,40	5,30	5.3
9	Menurunnya angka kemiskinan	10 Persentase Angka Kemiskinan	5,04	5,22	5,15	5,10	5,05	5,00	5.0
10	Menurunnya angka Inflasi	11 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6,75	6.42	6.31	6.24	6.17	6.02	6.02
11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	12 Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,11	2.09	2,09	2,08	2,08	2,08	2,08
12	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	13 Terbangunnya Daerah irigasi (ha)	1.034	1.084	1.135	1.187	1.240	1.294	1.294
		14 Ketersediaan air baku (m3)	N.A	N.A	N,A	90.000	145.000	175.000	175.000
13	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	15 Persentase lingkungan yang tertata	N.A	14%	34%	54%	86%	100%	100%
		16 Persentase bangunan yang tertata	N.A	16%	38%	56%	89%	100%	100%
		17 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	N.A						
14	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	18 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut	0.17%	0.17%	0.18%	0.19%	0.20%	0.21%	0.21%
		19 Persentase armada pengangkutan	N.A	0.33%	0.34%	0.35%	0.36%	0.37%	0.37%
		20 Persentase jalan kondisi mantap	92,2	93.50	94.50	95.50	96	96.50	96.50
15	Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat	21 Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	11,71	11.84	11.89	11.93	11.97	12.00	12.00
			L=11,93	L=12,08	L=12,37	L=12,51	L=12,69	L=12,81	L=12,81
			P=12,07	P=12,21	P=12,46	P=12,63	P=12,79	P=12,93	P=12,93
16	Meningkatnyakesehatan masyarakat	22 Angka Kesehatan Masyarakat	76,94	71,6	77,58	82,97	85,92	89,98	89,98
17	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	23 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		24 Tingkat kematangan Maturitas SPIP	3	3	3	3	4	4	4
		25 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	63	65	70	72	73	75	75

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		26 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat	N.A	2,75	2,78	2,8	2,85	2,9	2,9
18	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	27 Nilai rata-rata delapan area perubahan	N.A	30	35	40	45	50	50
		28 Indeks Profesionalitas ASN	60	63	67,5	73,5	81	90	90
19	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	29 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	N.A	1	5	5	6	7	7
		30 Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	N.A	B	B	B	B	B	B
20	Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	31 Skor aspek kebebasan sipil	81,70	87,75	87,76	87,79	87,80	87,82	87,82
		32 Skor aspek hak-hak politik	80,25	81,72	81,76	81,79	81,80	81,85	81,85
		33 Skor aspek lembaga demokrasi	80,10	80,30	80,33	80,36	80,50	80,54	80,54
21	Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	34 Indeks kapasitas bencana daerah	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,35
22	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	35 Indeks kualitas air sungai	64,56	65,85	67,80	67,16	68,51	69,88	69,88
		36 Indeks kualitas udara	82,81	85,30	87,86	90,49	93,21	96,01	96,01
		37 Indeks tutupan lahan	37,51	37,88	38,26	38,64	39,03	39,81	39,81
		38 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	N.A	7.745,58	7.280,85	6.843,99	6.433,35	6.047,35	6.047,35

D. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB

Beranjak dari pengalaman dalam melaksanakan pencapaian target-target MDGs yang belum optimal, telah disepakati penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB. TPB dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal, tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga daerah (kabupaten/kota) dan non pemerintah.

TPB merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No one left behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 *platform* partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda.

Setiap *platform* ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

TPB tidak hanya mencakup tujuan dan target, namun juga cara pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB di atas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berketetapan untuk menjadikan TPB sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD TPB ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh *platform* yang tercermin pada Matriks RAD, baik yang akan dilaksanakan oleh Pemda maupun nonpemerintah.

E. Pembiayaan TPB di Daerah

Sebagai wujud komitmen kuat dalam menjalankan TPB Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan TPB, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Sehubungan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemda, dalam aspek pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB di daerah. Sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBN dan APBD), namun juga pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan. Selanjutnya, kerjasama antara pemerintah dan swasta di wujudkan dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam upaya pencapaian pelaksanaan TPB.

F. Metodologi Penyusunan RAD TPB

Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, maka dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017, dokumen RAD TPB tahun 2018-2022 harus ditetapkan RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Untuk pencapaian sasaran TPB daerah, gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama bupati/walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAD SDGs menjadi sangat penting.

Mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 (lima) tahunan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan TPB.

Penyusunan RAD TPB dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (pokja) yang didasarkan atas Pergub terkait Tim Koordinasi Nasional TPB;
2. Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan Renaksi TPB;
3. Masing-masing pokja, yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi TPB, dengan tahapan:
 - a. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB
 - b. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator terkait dengan pencapaian TPB

- c. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana
 - d. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB
4. Melaksanakan pembahasan Draf RAD TPB (narasi dan matrik) masing-masing pokja;
 5. Melaksanakan pleno penyempurnaan Draf Final RAD TPB berdasarkan masukan hasil pembahasan dari masing-masing pokja; Melakukan Penyempurnaan Draf Final RAD TPB oleh Tim Pelaksana TPB;
 6. Mengesahkan RAD TPB oleh gubernur;
 7. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi RAD TPB kepada seluruh pemangku kepentingan;
 8. Melakukan penyusunan RAD TPB di tingkat daerah sesuai dengan proses penyusunan Renaksi TPB di tingkat nasional.
 9. Melakukan penyusunan RAD TPB di tingkat daerah sesuai dengan proses penyusunan Renaksi TPB di tingkat nasional

G. Sistematika RAD TPB

Sistematika penulisan dalam dokumen RAD TPB (RAD TPB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari sub bab sebagai berikut:

- A. Keselarasan (TPB) dengan RPJMD
- B. (TPB) Menyempurnakan MDGs
- C. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian (TPB) di Daerah
- D. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB
- E. Pembiayaan TPB di Daerah
- F. Metodologi Penyusunan RAD TPB
- G. Sistematika RAD TPB

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB

Bab II terdiri dari sub bab sebagai berikut:

- A. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun
- B. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- C. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- D. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- E. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- F. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

- G. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern
- H. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
- I. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
- J. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara
- K. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
- L. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- M. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan
- N. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan
- O. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
- P. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh
- Q. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB

Bab III terdiri dari sub bab sebagai berikut:

- A. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
- B. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
- C. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- D. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
- E. Tujuan 5 Kesetaraan Gender
- F. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- G. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
- H. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- I. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- J. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
- K. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- L. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- M. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
- N. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
- O. Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- P. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- Q. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bab IV terdiri dari sub bab sebagai berikut:

- A. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB 2018-2022
- C. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

Bab II

Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB

A. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

Berbagai macam definisi kemiskinan telah diungkapkan dan menjadi bahan perdebatan oleh pemerhati kemiskinan. Bank Dunia (2005) mendefinisikan kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan. Menurut Amartya Sen (1999), kemiskinan dapat terjadi akibat perampasan kapabilitas (*capability deprivation*), yakni kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang. Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi karena kelangkaan sumber daya alam sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah, sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena alokasi sumber daya yang ada tidak terbagi secara merata.

Keberagaman pandangan tentang kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multi dimensi. Fenomena ini membuat pengukuran kemiskinan menjadi tidak mudah. Namun demikian, kemiskinan tetap harus diukur sebagai gambaran dan bahan pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. *World Bank Institute* (2005) mengemukakan empat alasan urgensi pengukuran kemiskinan, yaitu:

1. Agar orang miskin terus berada dalam agenda dan diperhatikan,
2. Pengidentifikasian orang miskin dan keperluan intervensi mengenai pengentasan kemiskinan,
3. Pemantauan dan evaluasi proyek atau kebijakan intervensi terhadap orangmiskin,
4. Evaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan biasanya dikaitkan dengan konsep kemiskinan mutlak dan dilihat dari sisi ekonomi. Pengukuran tersebut menggunakan indikator kesejahteraan. Ravallion (1998) mengemukakan tiga tahapan pengukuran kemiskinan, meliputi:

1. Mendefinisikan indikator kesejahteraan yang digunakan,
2. Membangun standar minimum dari indikator kesejahteraan. Standar minimum ini dikenal dengan garis kemiskinan (GK),
3. Membuat ringkasan statistik.

Terkait pengukuran kemiskinan, *World Bank Institute* (2005) menyebutkan tiga ukuran agregat kemiskinan yang bisa dihitung, yaitu:

1. *Headcount index* (P_0) yang mengukur proporsi penduduk terkategori miskin. Kelebihan dari ukuran kemiskinan ini adalah kemudahannya dalam penghitungan dan mudah dipahami. Kelemahan *headcount index* ialah tidak memperhitungkan intensitas kemiskinan, tidak menunjukkan level kemiskinan, dan tidak berubah jika penduduk di bawah GK menjadi lebih miskin.
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1 atau *Poverty Gap Index*) yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P_1 berarti semakin dalam tingkat kemiskinan karena semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* atau *Squared Poverty Gap Index*/ P_2) yang mengukur sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P_2 berarti semakin parah tingkat kemiskinannya akibat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Di Indonesia, pengukuran kemiskinan dilakukan oleh BPS. Konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah kemampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Berdasarkan pendekatan ini, BPS merumuskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengeluaran per kapita per bulan dipakai sebagai variabel yang akan dibandingkan dengan besarnya nilai garis kemiskinan untuk menentukan seseorang dikategorikan miskin atau tidak miskin. Seseorang yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, dikategorikan sebagai penduduk miskin.

BPS merumuskan garis kemiskinan dengan menjumlahkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditas dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari Komoditas-Komoditas non-makanan terpilih, meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per Komoditas/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran Komoditas/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran Komoditas/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. GKM, GKNM, dan garis kemiskinan dihitung untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Perhitungannya pun dipisahkan juga untuk daerah pedesaan/perkotaan, sehingga nilainya tidak akan sama (tergantung cakupan/tingkatan wilayah dan daerah pedesaan/perkotaan).

1. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin atau *Headcount index* (P_0) adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK) dibanding dengan jumlah penduduk wilayah pada tahun yang bersangkutan. Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan Nasional selama 2013-2017 seperti ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 2.1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

No.	Persentase Penduduk Miskin (%)	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	5,25	4,97	4,83	5,04	5,30
2.	Nasional	11,46	10,96	11,13	10,70	10,12

Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung

Angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun terakhir (2013-2017) menunjukkan kecenderungan berfluktuasi. Pada tahun 2013, angka kemiskinan sebesar 5,25 % dengan jumlah penduduk miskin 69,41 ribu jiwa. Penurunan terus terjadi hingga tahun 2015 menjadi 4,83 % dengan jumlah penduduk miskin sebesar 66,62 ribu jiwa. Berbagai upaya yang ditempuh Pemda untuk mengurangi penduduk miskin sekaligus peningkatan taraf kesejahteraan penduduknya. Diantaranya melalui peningkatan perekonomian, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan namun tahun 2017 meningkat menjadi 5,30% dengan jumlah penduduk miskin 76,20 ribu jiwa tapi masih di bawah capaian nasional sebesar 10,12 %.

Sebagaimana pada level provinsi, pada seluruh wilayah masing-masing Kabupaten/Kota juga menunjukkan kecenderungan berfluktuatif. Pada tahun 2017 (September) persentase kemiskinan terendah adalah Kabupaten Bangka Barat sebesar 2,98 persen turun dibandingkan tahun 2013 sebesar 3,26 persen dan persentase tertinggi ada di Kabupaten Belitung sebesar 7,58 persen menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar 8,48 persen.

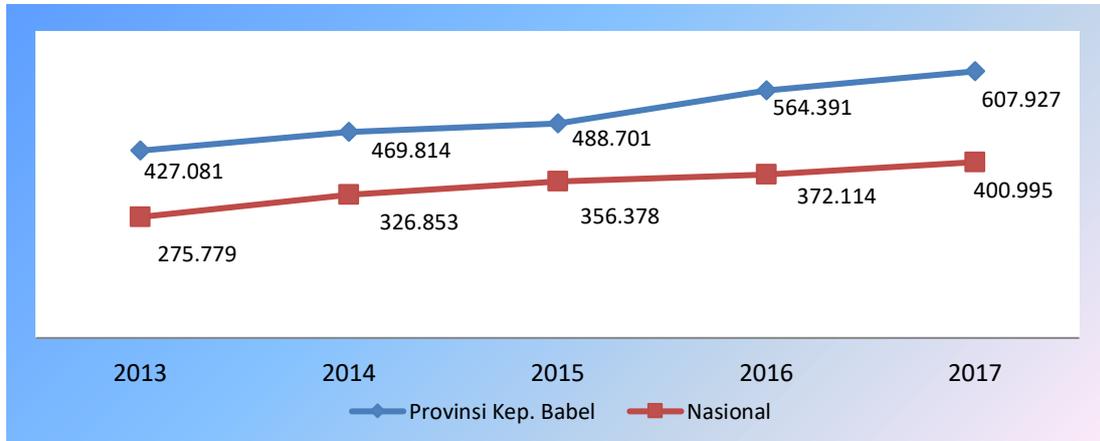
Tabel 2.2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	5.40	5,20	5,63	5,52	5,10
Belitung	8.48	7,36	8,38	7.85	7.58
Bangka Barat	3.26	3,15	3,08	2,74	2,98
Bangka Tengah	5.46	3,27	5,67	5,64	6,07
Bangka Selatan	4.01	3,87	3,74	3,62	3,92
Belitung Timur	6.90	6,68	7,33	6,99	6,81
Kota Pangkalpinang	4.15	4,04	4,97	5,02	4,80
Kepulauan Bangka Belitung	5,25	4,97	4,83	5,04	5,30

Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan data BPS, dalam kurun lima tahun terakhir Garis Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami kenaikan. Setiap tahun selalu mengalami peningkatan seperti terlihat pada tabel di bawah pada tahun 2017 garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 607.927 meningkat di bandingkan tahun 2013 sebesar Rp 427.081 dan tahun

2015 sebesar Rp 488.701. Bila dibandingkan dengan nasional masih di atas capaian nasional yaitu sebesar Rp 400.995. Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan yang tertinggi se-indonesia pada tahun 2017.



Gambar 2.1. Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013-2017

Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung

Pada tipe daerah perkotaan dalam tahun 2017, kontribusi 5 Komoditas terbesar terhadap garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung komponen makanan secara berturut-turut adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, kue basah dan telur ayam ras (sebesar 71,54%). Sedangkan pada komponen Non Makanan secara berturut berupa Perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan pakaian jadi anak-anak (sebesar 28,46%).

Pada tipe daerah perdesaan dalam tahun 2017, kontribusi 5 Komoditas terbesar terhadap garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung komponen makanan secara berturut-turut berupa beras, rokok kretek filter, kue basah, telur ayam ras, dan Mie instant (sebesar 73,73%). Sedangkan Non Makanan (Perumahan, bensin, listrik, Pendidikan dan Perlengkapan Mandi) sebesar 26,27%;

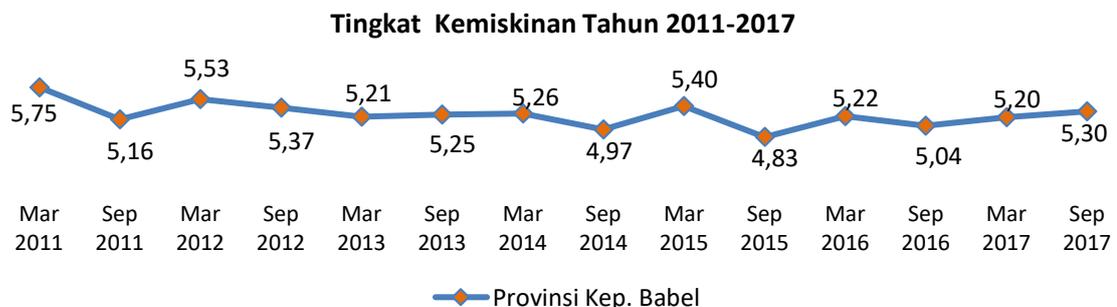
Tabel 2.3. Daftar Komoditi Penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Jenis komoditi (1)	Perkotaan (2)	Jenis komoditi (3)	Perdesaan (4)
Makanan:	71,54	Makanan:	73,73
Beras	14,89	Beras	19,27
Rokok kretek filter	12,32	Rokok kretek filter	13,70
Daging ayam ras	5,43	Kue basah	3,73
Kue basah	4,20	Telur ayam ras	3,63
Telur ayam ras	3,60	Mie instan	3,46
Tongkol/tuna/cakalang	2,97	Daging ayam ras	2,87
Mie instan	2,41	Gula pasir	2,62
Kembung	2,37	Bawang merah	1,84
Gula pasir	2,36	Cabe rawit	1,83
Bawang merah	1,78	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,78
Susu bubuk	1,67	Tongkol/tuna/cakalang	1,60
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,66	Kembung	1,54
Kue kering/biskuit	1,61	Roti	1,45
Tempe	1,52	Cabe merah	1,37
Cabe rawit	1,50	Tempe	1,23
Lainnya	11,26	Lainnya	11,82
Bukan Makanan:	28,46	Bukan Makanan:	26,27
Perumahan	8,22	Perumahan	9,45
Bensin	4,39	Bensin	3,75
Listrik	3,96	Listrik	2,86
Pendidikan	2,33	Pendidikan	1,46
Pakaian jadi anak-anak	1,10	Perlengkapan mandi	1,38
Pakaian jadi perempuan dewasa	1,08	Sabun cuci	1,00
Perlengkapan mandi	0,96	Pakaian jadi laki-laki dewasa	0,74
Lainnya	6,43	Lainnya	5,62

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2018

2. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada tahun 2012 (September), tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,37%, sementara pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,30 %. Terjadi penurunan 0,07 poin selama 5 tahun dalam masa RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2012-2017). Bila diperhatikan selama lima tahunan terjadi fluktuasi naik turun tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun masih dalam kisaran 4-6%. Ini mengindikasikan bahwa perlu kebijakan lain disamping program bantuan yang telah dilaksanakan selama ini seperti Program Beras Miskin/Sejahtera, Program PKH, Bantuan Tunai langsung dan Program Bea siswa miskin.



Gambar 2.2. Tingkat Kemiskinan Provinsi Kep. Babel 2011-2017

Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung

Tabel 2.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2016-September 2017

Daerah/Tahun (1)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) (2)	Persentase Penduduk miskin (3)
Perkotaan		
September 2016	19,37	2,67
Maret 2017	21,47	2,89
September 2017	23,04	3,00
Perdesaan		
September 2016	51,7	7,57
Maret 2017	52,61	7,74
September 2017	53,16	7,92
Total		
September 2016	71,07	5,04
Maret 2017	74,09	5,20
September 2017	76,20	5,30

Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung

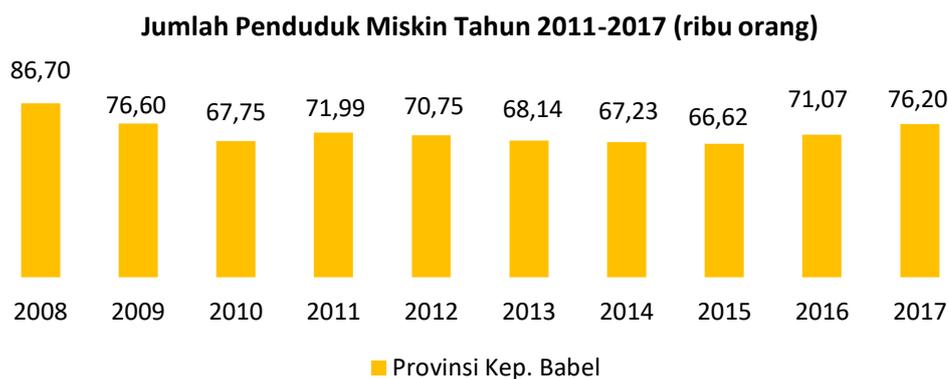
Berdasarkan hasil analisis BPS, turunnya tingkat kemiskinan pada September 2017 selaras dengan pertumbuhan positif beberapa indikator ekonomi. Pada Tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,47 persen. Lapangan usaha pertanian yang merupakan salah satu tumpuan utama penduduk miskin di pedesaan tumbuh sebesar 14,61 persen. Pada periode yang sama, lapangan usaha yang diduga menjadi tumpuan penduduk miskin di perkotaan seperti konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing tumbuh sebesar 9,37; 2,69; 6,17 persen.

Industri Mikro Kecil (IMK), yang juga merupakan salah satu basis perekonomian bagi penduduk miskin, turut mencatatkan pertumbuhan positif pada Triwulan II 2017. Pertumbuhan produksi IMK pada kurun waktu tersebut sebesar 2,93 (*q to q*) dan 18,25 (*y on y*).

3. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 70,75 ribu jiwa dan pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 68,14 ribu jiwa (berkurang 2,61 ribu jiwa). Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 76,20 ribu. Bila dibandingkan dengan penduduk tahun 2016 yang sebesar 71,07 ribu jiwa, maka berkurang sebesar 5,13 ribu jiwa.

Dari Tabel Jumlah penduduk miskin di bawah terlihat jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung berfluktuasi dalam 10 tahun terakhir (2008-2017) dimana jumlah terbesar tahun 2008 yaitu sebanyak 86,70 ribu jiwa sedangkan terendah pada tahun 2015 sebanyak 66,62 ribu jiwa.



Gambar 2.3. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2008 - 2017

Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung

4. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kep. Bangka Belitung 2012- 2017

Penanggulangan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengatasi kedalaman kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Pada tahun 2016 (September) tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,753, sedangkan pada tahun 2017 (September) tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,565 (turun sebesar 0,188 poin). Tingkat keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2016 (September) tingkat keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,158, sedangkan pada tahun 2017 (September) sebesar 0,111, terjadi penurunan sebesar 0,048 poin .

Tabel 2.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
<i>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</i>			
September 2016	0,286	1,248	0,752
Maret 2017	0,258	0,753	0,494
September 2017	0,486	0,655	0,565
<i>Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)</i>			
September 2016	0,044	0,280	0,158
Maret 2017	0,034	0,120	0,075
September 2017	0,121	0,098	0,111

Sumber: BPS, Susenas September 2016, Maret 2017, September 2017

5. Tingkat Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017

26

Untuk tingkat kemiskinan di perkotaan dan pedesaan dapat di lihat pada tabel di atas, Pada tahun 2016 (September), tingkat kemiskinan perdesaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 7,57% dan pada tahun 2107 kemiskinan perdesaannya sebesar 7,92%. Sedangkan untuk tingkat perkotaan Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,67% namun meningkat menjadi 3,0 % pada tahun 2017.

Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin di pedesaan pada tahun 2016 sebesar 51,7 ribu jiwa meningkat menjadi 53,16 ribu jiwa pada tahun 2017 Sedangkan untuk jumlah penduduk Miskin di Perkotaan pada tahun 2016 sebanyak 19,37 ribu jiwa meningkat menjadi 23,04 ribu jiwa pada tahun 2017.

7. Tantangan Pelaksanaan TPB

- a. Menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun 2022 sampai dengan 7%, dari tahun 2017 sebesar 12,36%. Mengingat selama 5 tahun terakhir penurunan tingkat kemiskinan rata-rata per tahun sebesar 0,70%.
- b. Terkait dengan angka 1, beberapa persoalan perlu dipecahkan untuk efektivitas penurunan tingkat kemiskinan:
 - 1) Menyatukan data antara kabupaten-provinsi-pusat
 - 2) Terjadinya *inclusion dan exclusion error* pada data yang saat ini ada (Basis Data Terpadu dan Data Terpadu Pogram Penanganan Fakir Miskin/DTPPFM)
 - 3) Menyelesaikan kesenjangan antara tingkat kemiskinan makro (Susenas) dengan tingkat kemiskinan termonitor (*by name by address*)
- c. Mengembalikan budaya, mental, karakter, atau perilaku miskin kembali kepada perilaku sosial yang bermartabat.
- d. Menyelesaikan kesenjangan antara input (termasuk pembiayaan) program kebutuhan dasar (misalnya perbaikan RTLH) dan signifikansinya terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
- e. Mengoptimalkan peran serta dari segala potensi yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan (CSR, perguruan tinggi, filantropy, dan lembaga lainnya: sosial masyarakat, Lembaga keagamaan, dsb).
- f. Mengoptimalkan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat yang berhak.

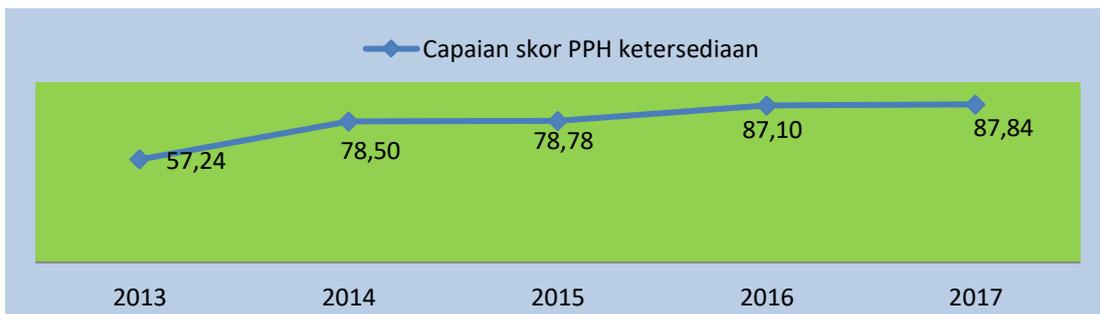
B. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara maupun perseorangan. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan pangan. Meliputi jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Selain itu, pangan tersebut tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,

dan budaya masyarakat. Pangan yang dimanfaatkan untuk hidup sehat, aktif, produktif, secara berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi dengan mengoptimalkan peran dari masing-masing komponen ketahanan pangan. Komponen tersebut adalah ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Semuanya dilakukan melalui kegiatan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, menjamin kemudahan masyarakat dalam mengakses pangan, menyosialisasikan tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat. Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Termasuk upaya pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan lokal.

Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat diukur dengan indikator kinerja skor PPH (Pola Pangan Harapan). Capaian skor PPH terlihat meningkat. Capaian tahun 2013 sebesar 87,84 (menggunakan data Susenas 2017 yang diolah). Hasil tersebut lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 78,78 dan tahun 2016 sebesar 87,10. Tercapainya indikator skor PPH ini disebabkan pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat karena meningkatnya kesejahteraan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA.



Gambar 2.4. Capaian Skor PPH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017
 Sumber: Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan didukung oleh 3 (tiga) sub sistem penyusunnya. Ketiga hal tersebut adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Sasaran strategis pembangunan ketahanan pangan pertama adalah terwujudnya ketersediaan pangan dengan indikator kinerja angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein. Ketersediaan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah tercukupi baik (baik pangan hasil produksi dalam daerah maupun dari impor). Pencapaian indikator ketersediaan energi dan protein tahun 2017 sebesar 1.784 kal/kapita/hari dan 101,41 gr/kapita/hari. Hasil ini melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan (sebesar 1.400 kkal/kapita/hari dan 63 gr/kapita/hari).



Gambar 2.5. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari Tahun 2015-2017

Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung

Dari sisi konsumsi, selain pelaksanaan Gerakan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), pencapaian target skor PPH didukung melalui usaha pemberdayaan wanita. Kegiatannya berupa pemanfaatan pekarangan, pengembangan diversifikasi produk antara, dan peningkatan sosialisasi maupun promosi penganeekaragaman konsumsi pangan lokal. Sasaran strategis pembangunan ketahanan pangan kedua adalah meningkatnya konsumsi pangan masyarakat dengan indikator kinerja angka konsumsi energi dan angka konsumsi protein. Capaian tahun 2017, angka konsumsi energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 2.643,27 kkal/kapita/hari dan angka konsumsi protein 82,73 gr/kapita/hari. Jika dibandingkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan (2.150 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari), tingkat konsumsi energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melebihi angka kecukupan. Tetapi jika dilihat dari keberagaman jenis/golongan pangan yang dikonsumsi masyarakat, masih perlu ditingkatkan, Khususnya konsumsi dari kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buah.

Tabel 2.6. Data Ketersediaan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

No	Keterangan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan Beras (Lokal)	Ton/Thn	16.652,00	16.873,00	15.838,00	20.706,00	21.722,00
2	Ketersediaan Beras (Import)	Ton/Thn	46.420,00	95.390,00	125.011,00	122.457,00	124.994,00
3	Ketersediaan Beras (Lokal + Import)	Ton/Thn	63.072,00	112.263,00	140.849,00	143.163,00	146.716,00
4	Kebutuhan Beras	Ton/Thn	120.073	124.621	117.535	119.663	121.876
5	Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/Hari	2.768,82	2.437,20	2.490,00	2.455,00	2.643,27
6	Ketersediaan Protein	Gram/Kap/Hari	65,07	79,38	71,56	71,08	82,73
7	Ketersediaan Lemak	Gram/Kap/Hari	120,53	144,63	76,55	91,81	94,08
8	PPH Ketersediaan	Skor	57,24	78,50	78,78	87,10	87,84

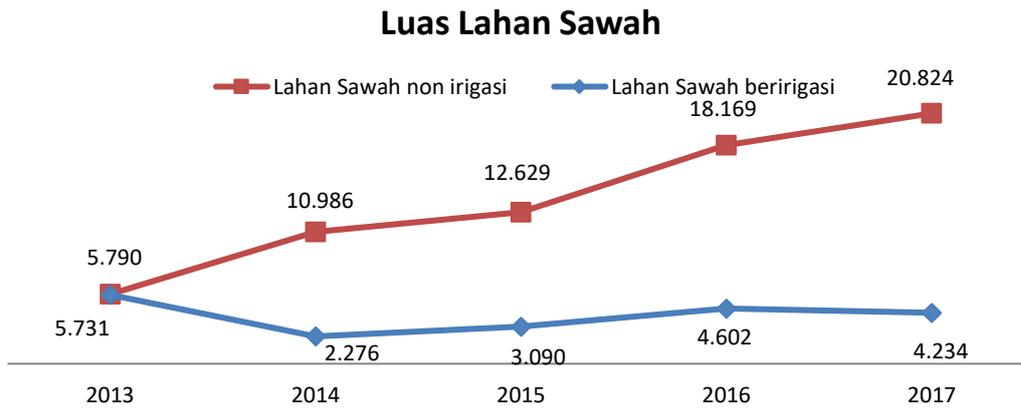
Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung

Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal, terutama umbi-umbian, menjadi alternatif terbaik dalam memenuhi kebutuhan energi. Hal tersebut sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit degeneratif (seperti diabetes, kanker, dan serangan jantung). Sebab umbi-umbian dapat dikembangkan menjadi makanan fungsional yang memiliki indeks glikemik rendah, kaya kandungan prebiotik dan antioksidan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tingkat ketersediaan energi dan protein lebih tinggi dibanding tingkat konsumsi masyarakatnya. Kondisi ini menggambarkan ketersediaan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencukupi bahkan melebihi kebutuhan konsumsi penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain mutu/kualitas konsumsi, aspek keamanan pangan sangat penting diperhatikan. Dengan terbukanya pasar terhadap produk pangan dari luar daerah maupun luar negeri, masalah dan tantangan keamanan pangan semakin kompleks. Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) telah berperan aktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengamankan pangan yang diproduksi maupun pangan yang beredar. Baik pangan segar maupun olahan. Sehingga pangan yang dikonsumsi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung aman dari berbagai cemaran fisik, biologis, kimiawi, maupun mikrobiologis. Pembinaan terhadap produsen pangan pun terus dilaksanakan agar produsen pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menyediakan pangan yang bermutu dan aman, sekaligus dapat bersaing menghadapi pasar bebas ASEAN (MEA).

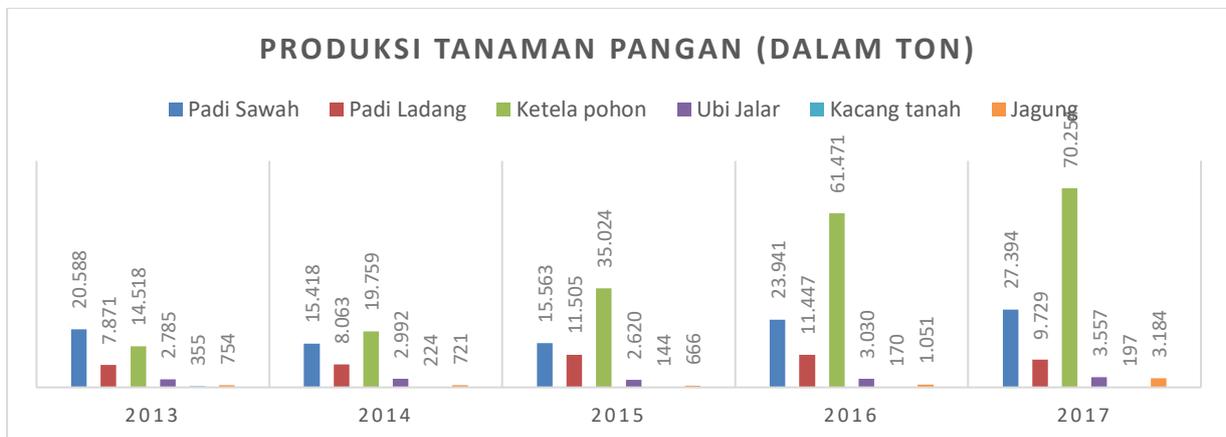
Distribusi dan akses pangan telah tertangani dengan baik. Fasilitas diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan dengan tujuan mendekatkan pangan ke masyarakat. Tujuannya tersedia pangan sesuai kebutuhan masyarakat setempat dengan harga terjangkau secara berkelanjutan. Gapoktan di daerah sentra produksi pangan difasilitasi agar dapat menampung dan mengelola hasil panen masyarakat setempat. Harga pangan pun dapat terjaga, tidak merugikan petani saat panen raya, dan tidak memberatkan konsumen saat musim paceklik. Harga pangan pokok yang berpengaruh terhadap inflasi dipantau secara rutin. Termasuk dilakukan pengendalian melalui operasi pasar oleh instansi terkait. Harga pangan pokok di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2017 relatif terkendali. Hal ini sangat didukung oleh keberadaan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Penyebab alih fungsi lahan yang tinggi disebabkan oleh: peningkatan kebutuhan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat, pertumbuhan sektor non pertanian, perkembangan kawasan perkotaan/urban, perubahan preferensi usaha akibat skala usaha pertanian yang tidak ekonomis, SDM pertanian yang kurang produktif, dan kerentanan petani menghadapi instabilitas harga produk segar pada saat panen. Upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan belum memberikan hasil yang diharapkan. Pada rentang tahun 2007-2017, lahan sawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari 57.443 ha menjadi 51.161 ha (rata-rata sebesar 1,13% per tahun). Tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana lahan produktif yang masih ada dimanfaatkan secara optimal dan arif agar tidak berkurang fungsi dan kemanfaatannya. Sawah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi sawah beririgasi dan sawah non-irigasi (sawah tadah hujan). Luasan sawah beririgasi cenderung mengalami penurunan dari tahun ketahun, namun sebaliknya sawah non irigasi/tadah hujan mengalami kenaikan. Data luas lahan sawah irigasi dan non irigasi/tadah hujan dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2.6. Perkembangan Luas Lahan Sawah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Sumber: BPS, 2018

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuasi produksi padi pada kurun waktu 2013-2017, dimana pada tahun 2017 secara keseluruhan jumlah produksi padi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2.045 ton. Dilihat dari produksi pertanian sawah dan ladang tahun 2017, pertanian mengalami penurunan sebesar 34.204 ton dan ladang mengalami peningkatan sebesar 1.507 ton pada tahun 2017 karena peningkatan produktivitas. Produksi jagung selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, 2016, dan 2017 lebih rendah dibandingkan tahun 2014. Hal ini diakibatkan oleh musim kemarau basah yang mengganggu produksi dan penyusutan lahan pertanian. Produksi tanaman pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Gambar 2.7. Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam ton), Tahun 2013-2017
 Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung

Untuk sub sektor peternakan, jumlah populasi ternak tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,53% dibanding tahun 2016 (setara dengan 578.361 ekor). Ternak unggas merupakan komoditas yang pertumbuhannya cukup tinggi. Kebutuhan unggas untuk bahan pangan cukup tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama dalam rangka mendukung daerah ini sebagai tujuan wisata. Rata-rata pertumbuhan selama periode 2013 hingga 2017 sebesar 7,50%. Lebih rinci pertumbuhan populasi ternak disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7. Populasi Ternak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam ekor), Tahun 2013-2017

Kelompok	Produksi Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Ternak besar	36.025	44.693	46.667	42.996	49.657
Ternak unggas	11.325.820	12.818.728	11.509.884	10.389.910	9.727.367

Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung

Populasi ternak besar (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan babi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh babi yang berkontribusi sebesar 62,83 %. Sedangkan sapi memberikan sumbangan sebesar 25,46 %. Untuk Kabupaten Kota, Kabupaten Bangka merupakan populasi ternak terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara ayam ras pedaging merupakan kontributor terbesar kelompok ternak unggas dengan peranan sebesar 81,26 %. Kabupaten Bangka adalah produsen dari ayam ras pedaging terbesar dengan kontribusi sebesar 30,74 % dan Kabupaten Belitung dengan kontribusi terkecil sebesar 3,75 % pada tahun 2017.

Produksi perkebunan, komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kelapa Sawit, Lada dan Karet. Untuk komoditas lada, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah dikenal luas sebagai penghasil lada putih terbesar di Indonesia dengan nama Muntok White pepper. Produksi lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 mencapai 51.166 Ton dengan luas tanam 52.247 Ha. Produksi tersebut tersebar di 6 Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kabupaten Bangka Selatan menjadi sentra produksi lada sebesar 17.009 Ton pada tahun 2017. Sedangkan untuk produksi karet tahun 2017 sebesar 34.173 Ton meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 33.180 ton. Sentra produksi karet tersebar di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel 2.8. Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Komoditas	Produksi Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Lada	49.917	56.920	52.101	51.286	51.166
Karet	33.596	33.828	31.408	33.180	34.173

Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung

Produksi perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 208.019 Ton untuk perikanan tangkap sedangkan untuk perikanan budidaya sebesar 3.845 Ton. Produksi perikanan tangkap terbesar di Kabupaten Belitung dengan produksi 68.197 ton meningkat di bandingkan tahun 2016 sebesar 67.189 Ton disusul dengan Kabupaten Bangka Selatan dengan produksi sebesar 37.382 Ton menurun dibandingkan produksi tahun 2016 sebesar 41.309 ton. Untuk produksi Perikanan

budidaya terbesar di Kabupaten Bangka Tengah dengan produksi sebesar 1.457 Ton meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 1.428 Ton. Produksi perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjukkan dalam gambar dibawah ini:



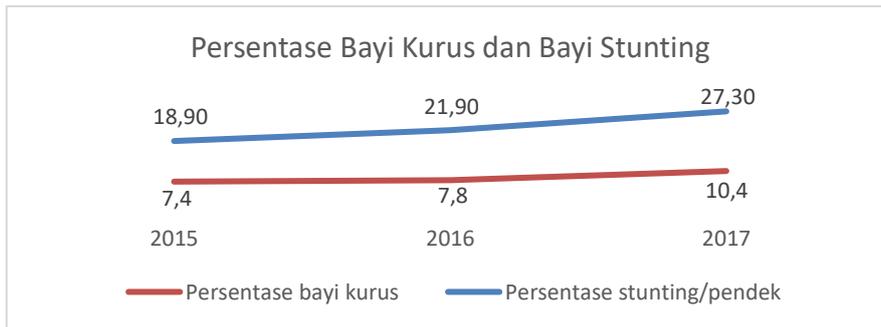
Gambar 2.8. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung

Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi. Prevalensi *stunting* pada anak di bawah dua tahun (baduta) masih cukup tinggi dan angkanya fluktuatif. Pada tahun 2014, proporsi *stunting* pada anak balita sebesar 22,1% dan menurun menjadi 19,8% tahun 2017. Angka Kurang Gizi pada balita masih menjadi masalah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angkanya meningkat sejak tahun 2014 sampai tahun 2017. Tahun 2014 sebesar 12,7% dan tahun 2017 menjadi 15,9%. Faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi *stunting* dan kurang gizi adalah rendahnya akses terhadap makanan dari jumlah dan kualitas gizi, pola asuh yang kurang baik (terutama pada perilaku dan praktek pemberian makan bayi dan anak), rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan (termasuk akses sanitasi dan air bersih). Masalah *stunting* dan kurang gizi juga berhubungan dengan konsumsi pangan. Data menunjukkan balita 53% defisit energi dan 24,3% defisit protein, dan ibu hamil 51,2% defisit energi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan gizi berkaitan dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak.

Permasalahan gizi yang lain adalah masih tingginya prevalensi anemia ibu hamil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2015 sebesar 14,85 % dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 16,09 %. Upaya penurunan prevalensi anemia ibu hamil perlu dilakukan secara optimal. Sebab target penurunan jumlah kematian ibu menjadi prioritas permasalahan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Prevalensi ibu hamil yang menderita KEK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan. Tahun 2015 adalah 9,11%, tahun 2016 menjadi 10,39 %, tahun 2017 menjadi 10,70. Permasalahan anemia ibu hamil dan ibu hamil KEK merupakan permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan penanganan lebih baik, mengingat status kesehatan ibu hamil sangat menentukan dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada prevalensi gizi lebih pada anak balita. Gizi lebih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga merupakan masalah kesehatan yang harus mendapatkan perhatian. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, balita kegemukan (berat badan per Umur) tahun 2014 adalah 5,84%. Tahun 2015 menjadi 3,81% dan tahun 2016 menjadi 3,11%. Pada usia diatas 18 tahun, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu provinsi dengan angka obesitas diatas nasional. Prevalensinya sebesar 15,8%, sementara nasional adalah 15,4% (Risksedas, 2013). Dengan memperhatikan masalah gizi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi beban ganda permasalahan gizi, yaitu permasalahan gizi kurang dan gizi lebih.



Gambar 2.9. Persentase bayi Kurus Gizi dan Stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2017

Sumber : Profil Kesehatan Dinkes Provinsi Kep. Babel

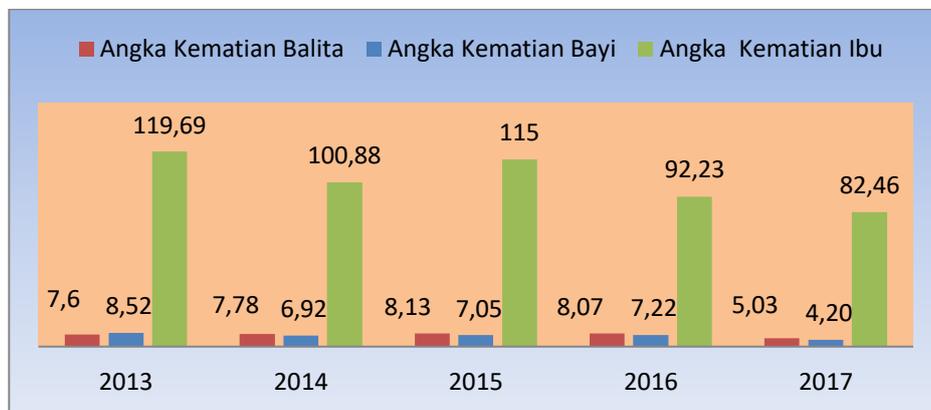
C. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Upaya pemerintah mengurangi AKI adalah memastikan setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditangani tenaga kesehatan. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), persalinan di fasilitas kesehatan meningkat setiap tahunnya. Persentasenya adalah 46% (2007), 63,2% (2012) dan 79% (2017). Data Susenas menunjukkan peningkatan sebesar 77,6% (2015) dan 79,7% (2016). Proporsi kelahiran yang dibantu tenaga medis profesional meningkat dari 73% (2007), 83% (2012) dan menjadi 90,9% (2017).. Sedangkan persalinan di fasilitas kesehatan pencapaiannya tahun 2013 sebesar 99,80% dan tahun 2017 sebesar 99,87%. Jumlah kematian ibu angkanya fluktuatif, tetapi ada kecenderungan menurun. Angka kematian ibu tahun 2012 sebesar 137,56, tahun 2015 menurun menjadi 115 dan menjadi 82,46 per 100.000 kelahiran pada tahun 2017. Secara nasional AKI telah menurun dari 346 kematian (SP 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015). Artinya terjadi penurunan sebesar 2,4% setiap tahun (*Annual ReductionRate/ARR*). Target RPJMN pada tahun 2019 sebesar 306 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup telah tercapai. Dibutuhkan ARR sebesar 9,5% untuk mencapai target TPB AKI yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita. Kematian bayi adalah indikator kesejahteraan masyarakat. Jumlah kematian bayi menurun dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Angka kematian bayi di

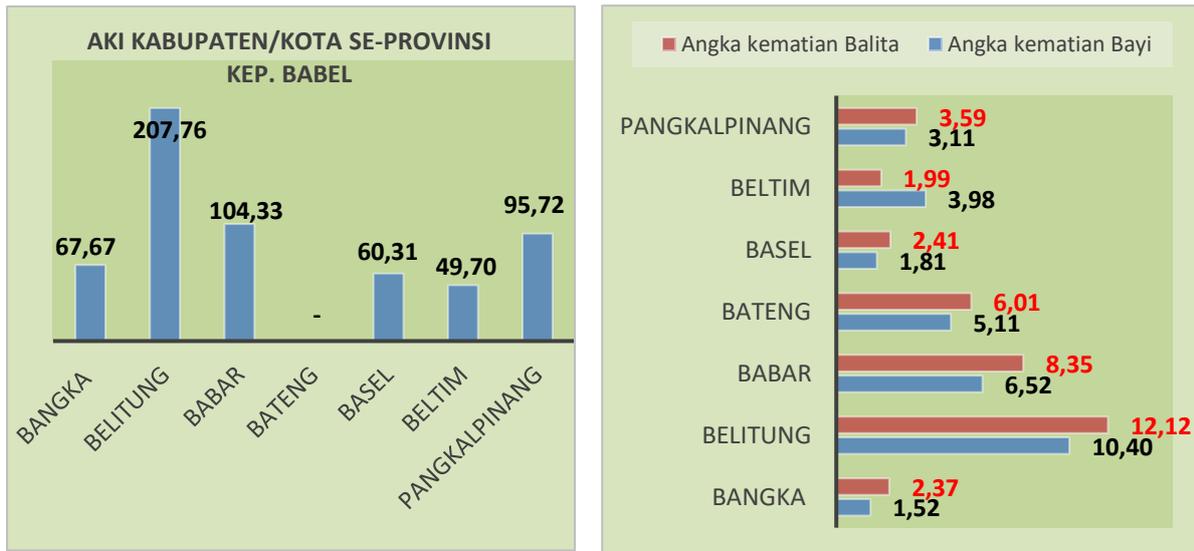
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung menurun dalam lima tahun terakhir, tahun 2012 sebesar 9,67 turun menjadi 7,05 pada tahun 2015 dan menjadi 4,20 pada tahun 2017. Sedangkan kematian balita pun mengalami penurunan dari 10,45 pada tahun 2012 menjadi 8,13 kematian pada tahun 2015 dan turun menjadi 5,03 pada tahun 2017. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBA) di Indonesia terus menurun. Data SDKI tahun 1991 sebesar 68 per 1000 kelahiran hidup menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup tahun 2017. Angka Kematian Balita (AKBA) mengalami penurunan sejak tahun 1991. Dari 97 per 1000 kelahiran hidup menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup tahun 2017.

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) stagnan dalam 3 tahun terakhir. Capaian tahun 2015 sebesar 97,16% menjadi 97,44% tahun 2017. Data SDKI dan Riskesdas menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) terus mengalami peningkatan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi meningkat dari 71,2% (2013) menjadi 80,7% (2016). Meskipun meningkat, sebesar 32,1% anak usia 12-23 bulan mendapatkan imunisasi yang tidak lengkap, dan 8,7% yang sama sekali tidak pernah mendapatkan imunisasi.



Gambar 2.10. Jumlah Kematian Bayi, Balita, dan Ibu tahun 2012-2017
 Sumber : Profil Kesehatan Dinkes Provinsi Kep. Babel

Sedangkan untuk capaian Kabupaten/Kota, angka kematian ibu (AKI) tahun 2017 terbesar di Kabupaten Belitung sebesar 207,76 diikuti Kabupaten Bangka Barat sebesar 104,33 sedangkan Kabupaten Belitung Timur dengan angka kematian ibu yang terkecil yaitu sebesar 49,70. Untuk Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka Kematian Balita (AKABA) tertinggi di Kabupaten Belitung sebesar 10,40 dan 12,12 pada tahun 2017, diikuti oleh Kabupaten Bangka Barat dengan 6,52 dan 8,35 sedangkan terendah di Kabupaten Bangka dengan 1,52 dan 2,37. Strategi untuk menyelesaikan persoalan masih tingginya angka kematian ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, sistem rujukan, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 2) peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; 3) peningkatan surveilans gizi; 4) peningkatan kompetensi petugas gizi dan KIA; 5) pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak; dan 6) peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama capaian imunisasi tiap desa dan daerah yang belum sepaham untuk imunisasi.



Gambar 2.11. Jumlah Kematian Bayi, Balita, dan Ibu untuk Kabupaten/Kota tahun 2017

Sumber : BBDA Provinsi Kep. Bangka Belitung

Mengakhiri Epidemii Penyakit Menular. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan ke-9 sebagai provinsi dengan penderita HIV/AIDS terbanyak. Kasus HIV/AIDS menunjukkan kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir, namun prevalensi masih dapat ditahan di bawah 0,5%. Jumlah ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) terus meningkat dari 168 orang tahun 2013 menjadi 270 orang pada 2017. Untuk penyakit Demam Berdarah (DBD) dari tahun 2013-2017 terlihat berfluktuasi dimana tahun 2015 sebanyak 740 kasus meningkat menjadi 743 kasus pada tahun 2015 namun menurun pada tahun 2017 menjadi 339 kasus. Untuk kasus di Kabupaten Kota, terbanyak kasus DBD yang ditemukan di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 87 kasus pada tahun 2017 dan yang terendah di Kabupaten Belitung sebanyak 2 Kasus DBD. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah endemis Malaria, yang sampai dengan saat ini belum dapat dieliminasi. Wilayah endemis malaria berada di Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Tengah sedangkan untuk empat kabupaten lainnya dan Kota Pangkalpinang sudah bebas malaria, hal ini dapat dilihat pada Tabel angka prevalensi Malaria di bawah ini dan ditargetkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan bebas penyakit malaria tahun 2022.

Tabel 2.9. Jumlah kasus HIV dan AIDS 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	56	53	25	33	70
2	Belitung	20	34	27	22	31
3	Bangka Tengah	7	19	35	5	13
4	Bangka Barat	18	14	16	15	34
5	Bangka Selatan	9	15	0	6	8
6	Belitung Timur	5	3	4	1	3
7	Kota Pangkalpinang	53	67	65	63	111
	Kepulauan Bangka Belitung	168	205	162	111	270

Sumber : BBDA Provinsi Kep. Bangka Belitung

Tabel 2.10. Cakupan Penemuan Penderita Penyakit Demam Berdarah (DBD)

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	131	74	206	67	62
2	Belitung	190	36	114	158	2
3	Bangka Tengah	123	95	158	126	50
4	Bangka Barat	193	45	77	65	87
5	Bangka Selatan	48	55	89	24	45
6	Belitung Timur	8	9	U26	12	41
7	Kota Pangkalpinang	47	18	77	38	52
	Kepulauan Bangka Belitung	740	332	747	498	339

Sumber : BBDA Provinsi Kep. Bangka Belitung

Tabel 2.11. Angka Prevalensi Malaria tahun 2012-2017

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bangka	1,67	0,97	0,48	0,21	0,13	0,05
2	Belitung	1,97	0,66	1,31	0,09	0,01	0,01
3	Bangka Tengah	4,28	2,13	2,28	0,19	0,36	0,24
4	Bangka Barat	4,52	4,23	0,98	0,74	0,09	0,00
5	Bangka Selatan	2,08	0,66	1,63	0,30	0,17	0,16
6	Belitung Timur	1,58	0,57	0,98	0,05	0,07	0,00
7	Kota Pangkalpinang	0,67	0,39	0,31	5,18	0,92	0,01
	Kepulauan Bangka Belitung	2,36	1,39	0,68	0,97	0,18	0,24

Sumber : BBDA Provinsi Kep. Bangka Belitung

Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM). Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi hipertensi adalah sebesar 25,8% (hampir 42,1 juta penduduk di atas 18 tahun). Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beberapa prevalensi PTM melebihi angka nasional. Prevalensi Diabetes Mellitus sebesar 2,6% dibanding nasional 1,5%. Hipertensi hampir sama dengan angka nasional (25,7%), stroke 16,9 permil dibandingkan nasional 12,1 permil, dan kanker 4,1 permil dibandingkan nasional 1,4 permil. Prevalensi hipertensi pun mengalami fluktuasi berdasarkan Riskesdas 2007, Riskesdas 2013 dan Sirkesnas 2016. Prevalensi obesitas penduduk Indonesia di atas usia 18 tahun meningkat dari 10,3% (2007) menjadi 15,4% atau sekitar 23,5 juta penduduk (2013).

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, prevalensi obesitas diatas angka nasional sebesar 15,8%. Perilaku merokok, selain pola makan dengan gizi tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik, menyumbang pada peningkatan prevalensi PTM di Indonesia. Proporsi penduduk umur di atas 15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau meningkat dari 34,2% (2007) menjadi 36,3% (2013). Sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angkanya lebih kecil dari nasional, yaitu sebesar 15,6%. Sebanyak 26,1% penduduk Indonesia kurang aktivitas fisik, dan tidak berbeda jauh dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang angkanya 27,5%. Konsumsi buah dan sayur pada 93,5% penduduk di atas usia 10 tahun masih kurang, sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlahnya lebih kecil dari angka nasional sebesar 52,1% (2013).

Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular adalah: 1) perluasan *screening* wajib pada ibu hamil dan kelompok beresiko tinggi; 2) kerja sama lintas sektor dan masyarakat untuk penemuan TB; 3) perluasan penggunaan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) TB ke seluruh RS untuk meningkatkan temuan kasus baru TB; 3) peningkatan upaya mencegah *Multi Drug Resistance* (MDR); 4) peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS (obat ARV, reagen dan *diagnostic kit*) dan TB; 5) Eliminasi malaria. Tantangan untuk menurunkan kematian akibat PTM diantaranya: 1) penjangkauan 2/3 penderita PTM yang belum mengetahui bahwa telah menderita PTM; 2) peningkatan upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko PTM; dan 3) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta fasilitas layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita PTM.

Mencapai Cakupan Kesehatan Universal. Jumlah penduduk yang tercakup dalam JKN terus meningkat Sampai dengan 31 Desember 2017, tercatat sebanyak 1.023.815 penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau 75,89 % yang menjadi peserta program JKN dengan 576.558 peserta mandiri dan 447.257 peserta untuk masyarakat miskin atau PBI KIS (Peserta bantuan iuran kartu Indonesia Sehat). Mengacu pada Pepres No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan sasaran RPJMN 2015-2019 terhadap UHC sebesar minimal 95 % penduduk Indonesia harus menjadi peserta JKN, maka untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru 2 (dua) Kabupaten yang mencapai UHC yaitu Kabupaten Belitung sebesar 97,16 % dan Kabupaten Belitung Timur sebesar 95,25 %. Sedangkan Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat yang masih rendah yaitu 50,22 % dan 61,61 %. Strategi ke depan untuk pencapaian Universal Health Coverage (UHC) perlu diarahkan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antar wilayah. Upaya yang perlu dilakukan adalah: 1) menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah; 2) mendorong Pemda untuk dapat mendorong integrasi jamkesda ke dalam JKN; 3) memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta/mandiri; dan 4) mengurangi ketimpangan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan adalah rendahnya peserta yang termasuk dalam kategori mandiri dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.



Tabel 2.12. Capaian Universal Healt Coverage (UHC) Kabupaten Kota tahun 2017
 Sumber : BPJS Provinsi Kep. Bangka Belitung

Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin.

Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat terutama untuk tenaga dokter (dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis), namun, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan belum merata. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah dimana untuk dokter umum di Kabupaten Bangka sebanyak 107 orang dokter pada tahun 2017 sedangkan di Kabupaten Bangka Selatan hanya 36 orang dokter, sedangkan untuk dokter gigi terlihat sangat kekurangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama di Kabupaten Bangka Selatan yang hanya 6 orang dokter dan Kabupaten Belitung Timur hanya 8 orang dokter. Tantangan yang dihadapi adalah: 1) peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan; 2) meningkatkan penggunaan obat rasional dan memperkuat sistem pengawasan obat.

Tabel 2.12. Jumlah Tenaga Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Wilayah	2013			2014			2015			2016			2017		
	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Prov. Kep. Babel	10	0	1	10	0	1	25	7	23	24	1	9	27	7	24
Bangka	61	9	16	61	9	16	82	17	47	68	25	40	107	21	27
Belitung	40	10	6	40	10	6	45	14	18	67	14	39	39	11	25
Bangka Tengah	44	7	5	44	7	5	47	11	6	39	9	7	46	10	20
Bangka Barat	36	7	3	36	7	3	42	5	7	48	9	7	65	10	8
Bangka Selatan	23	7	3	23	7	3	32	7	6	28	5	11	36	6	9
Belitung Timur	32	10	4	32	10	4	41	9	10	37	8	11	53	8	9
Pangkalpinang	56	19	42	56	19	42	69	25	44	75	24	46	80	22	28
Jumlah	292	69	83	292	69	83	383	95	161	386	95	179	453	95	150

Keterangan :

U : Dokter Umum; G : Dokter Gigi; sp : Dokter Spesialis

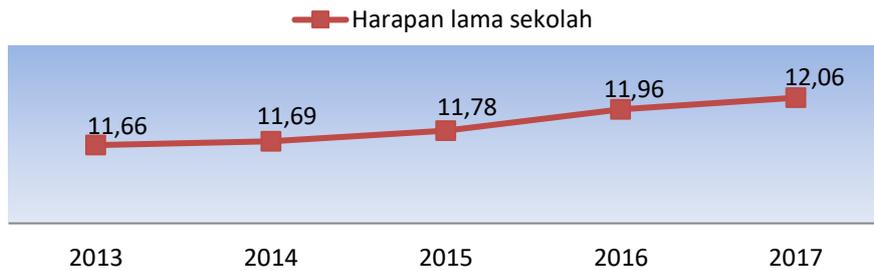
Sumber : BBDA Provinsi Kep. Bangka Belitung

D. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Dalam hal pembangunan pendidikan, keberhasilan pembangunan pendidikan ditunjukkan dengan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas mutu pendidikan yang memadai, terwujudnya kesetaraan dalam pendidikan, dan jaminan kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan diantaranya: Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Putus Sekolah (APS).

1. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)

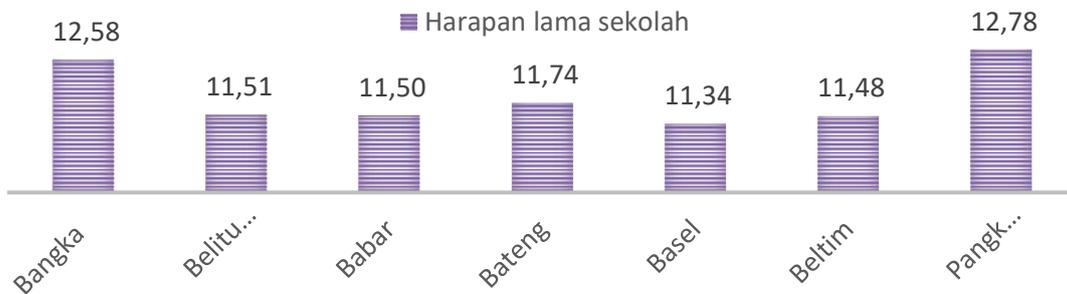
Mulai tahun 2014, BPS melakukan penyempurnaan beberapa indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk metodologi penghitungannya. Sebagai salah satu komponen penyusunan IPM, Angka Melek Huruf dianggap tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Indikator baru yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs). AHLs ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Capaian AHLs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 adalah sebesar 11,78 tahun, meningkat 0,12 poin dari 11,66 pada tahun 2013 dan tahun 2017 meningkat menjadi 12,06 tahun.



Gambar 2.13. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Sumber : BBDA Provinsi Kep. Bangka Belitung

Dari tabel di bawah terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2017 tertinggi di Kota Pangkalpinang sebesar 12,78 tahun dan diikuti oleh Kabupaten Bangka sebesar 12,58 tahun sedangkan terendah di Kabupaten Bangka Selatan dengan Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 11,34 tahun dan diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur sebesar 11,48 tahun.

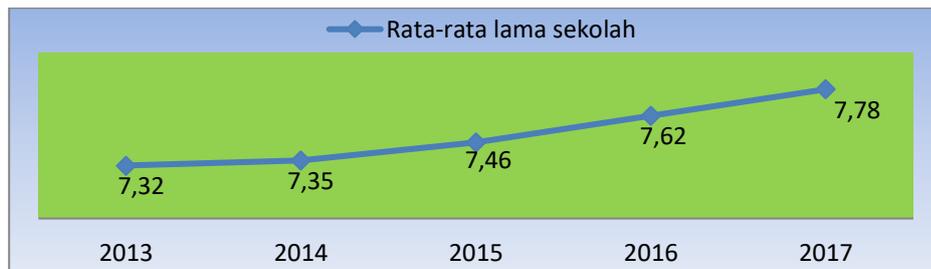


Gambar 2.14. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Sumber : BBDA Provinsi Kep. Bangka Belitung

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

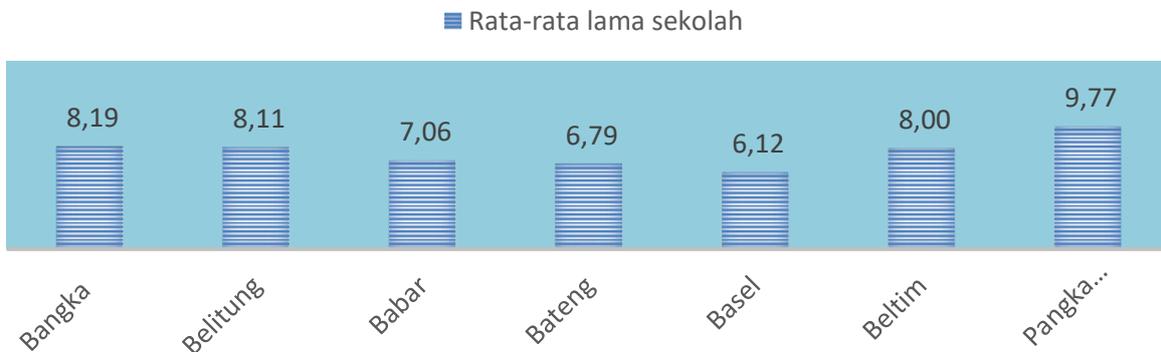
Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Capaian angka rata-rata lama sekolah mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Angka rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor dari internal peserta didik sendiri. Untuk meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan pendidikan. Selama 2013-2017 terjadi tren peningkatan capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu dari 7,32 di tahun 2013 menjadi 7,78 di tahun 2017. Ini berarti selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan 0,76 tahun untuk rata-rata lama sekolah.



Gambar 2.15. Rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017. Dilihat data per kabupaten/kota, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2017 tertinggi adalah Kota Pangkalpinang sebesar 9,77 tahun diikuti oleh Kabupaten Bangka sebesar 8,19 sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Bangka Selatan sebesar 6,12 dan diikuti oleh Kabupaten Bangka Tengah sebesar 6,78.



Gambar 2.16. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

E. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

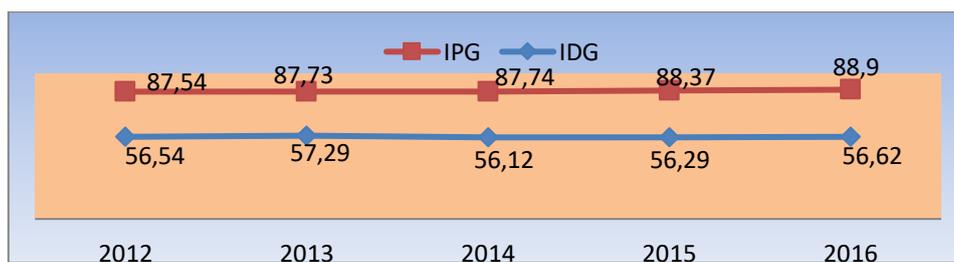
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua indeks penting untuk melihat capaian pembangunan kesetaraan gender. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih capaian yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, IPG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 88,37 dan meningkat menjadi 88,90 pada tahun 2016. Selain itu, disparitas pencapaian IPG antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tajam. Berdasarkan data tahun 2016 capaian IPG tertinggi sebesar 93,82 untuk Kota Pangkalpinang dan terendah 82,93 untuk kabupaten Bangka Selatan. Demikian pula dengan IDG, berdasarkan data rilis dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, capaian IDG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun 2016 capaian IDG sebesar 56,62 meningkat dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar 56,29.

Tabel 2.13. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2016

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bangka	85,86	86,03	86,77	86,92	87,17	88,07
2.	Belitung	85,59	85,73	86,61	87,19	87,98	88,31
3.	Bangka Barat	87,28	87,86	88,11	88,56	88,71	89,01
4.	Bangka Tengah	89,26	90,06	90,28	90,60	90,61	90,55
5.	Bangka Selatan	79,75	81,24	82,17	82,52	82,83	82,93
6.	Belitung Timur	83,95	84,17	84,29	85,37	86,10	86,50
7.	Kota Pangkal Pinang	82,05	92,08	92,30	92,47	93,09	93,82
	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	87,10	87,54	87,73	87,74	88,37	88,90

Sumber: Profil Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Salah satu faktor krusial penyebab menurunnya skor IPG dan IDG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah rendahnya tingkat partisipasi perempuan di ranah politik. Tantangannya adalah meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengarusutamaan gender. Disamping itu, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.



Gambar 2.17. Trend IPG dan IDG Tahun 2012-2016

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

1. Kekerasan oleh pasangan: diperkirakan 1 dari 5 (19,3%) perempuan berusia 18-49 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangannya sepanjang hidupnya. Lebih lanjut, 2 diantara 10 (5,5%) orang perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan emosional sebesar 17,5%. Sedangkan rentang usia mayoritas perempuan yang mengalami kekerasan adalah 35-49 tahun (12,5%).
2. Kekerasan oleh selain pasangan: Sebesar 10,1% pernah mengalami kekerasan fisik sebelum berusia 15 tahun. Sebagian besar pelaku kekerasan sejak berusia 15 tahun adalah orang-orang yang dikenal baik oleh korban. Prevalensi kekerasan seksual yang dilakukan oleh non-pasangan sejak usia 15 tahun adalah sebanyak 2,4%. Terdapat sebanyak 22,5 % perempuan yang mengaku mengalami kekerasan seksual semenjak usia 15 tahun. Pelaku kekerasan seksual non-pasangan terbesar (39,5%) adalah orang yang terdekat dikenal oleh korban.

Tabel 2.14. Rasio Kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah KDRT	115	84	88	92	90
2.	Jumlah Rumah Tangga	371.242	368.504	345.928	353.520	354.127
3.	Rasio KDRT	0,031	0,023	0,025	0,023	0,025

Sumber: *Profil Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018*

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), adalah: (i) membangun sistem data dan informasi KtP; (ii) meningkatkan komitmen pemangku kepentingan terkait serta koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iii) meningkatkan efektifitas upaya-upaya pencegahan KtP dan penanganan korban KtP; dan (iv) meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KtP.

Menghapus Semua Praktik Berbahaya. Persentase perempuan yang menikah di bawah usia 16 tahun 2016 sebesar 12,14% turun di tahun 2017 menjadi 11,71%. Pada tahun 2017, Kabupaten Bangka Selatan menjadi Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki persentase tertinggi untuk pasangan yang menikah di bawah usia 16 tahun yaitu sebesar 18 % dan diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur dengan persentase 13,61% sedangkan Kabupaten terendah untuk pasangan yang menikah dibawah umur 16 tahun di Kabupaten Bangka Barat dengan persentase 8,29%.



Sumber: BPS, Susenas 2016-2017

Gambar 2.18. Persentase perkawinan berdasarkan usia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2017

Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki ditemukan dalam rata-rata lama sekolah. Secara keseluruhan, angka rata-rata sekolah perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 7.80 tahun, sementara laki-laki adalah 8,25 tahun pada tahun 2016. Selisih di antara keduanya mencapai 0,45 tahun. Kondisi ini secara merata terjadi di setiap daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Kabupaten Bangka Barat, kesenjangan paling melebar mencapai 0,66 tahun dimana rata-rata lama sekolah laki-laki mencapai 7,88 tahun, sementara perempuan di angka 7,22 tahun. Namun untuk capaian terendah rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Selatan dengan capaian laki-laki sebesar 6,77 tahun dan perempuan 6,47 tahun.

Tabel 2.15. Rata-rata Lama sekolah Tahun 2012-2016

No	Kabupaten/ Kota	2012		2013		2014		2015		2016	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1	Bangka	8,56	7,51	8,34	7,63	8,28	7,47	8,12	8,03	8,50	8,25
2	Belitung	7,94	7,24	8,40	8,09	8,15	7,82	8,33	8,13	8,44	7,81
3	Bangka Barat	7,17	6,64	7,10	6,48	7,47	6,89	7,69	7,31	7,88	7,22
4.	Bangka Tengah	7,40	6,65	7,48	6,76	7,35	6,61	7,25	6,75	7,41	6,91
5.	Bangka Selatan	6,37	5,54	6,45	6,35	6,56	6,23	5,90	5,65	6,77	6,47
6.	Belitung Timur	7,98	7,50	7,59	7,31	8,20	7,74	7,88	7,78	8,72	8,29
7.	Pangkalpinang	9,91	8,98	9,83	9,19	10,00	9,33	10,26	9,71	9,94	9,36
	Provinsi	7,94	7,17	7,94	7,44	8,03	7,46	7,92	7,65	8,25	7,80

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Pemerataan pendidikan bagi perempuan dan laki-laki dan rendahnya angka rata-rata lama sekolah tidak terbatas pada persoalan ekonomi, infrastruktur, dan kondisi geografis. Di bidang pendidikan, pemerataan bagi perempuan dan laki-laki berkaitan dengan berbagai faktor yang lebih rumit dan seringkali tidak kasat mata. Seperti stereotip gender yang melekat baik pada laki-laki atau

perempuan. Pernikahan dini dan kehamilan remaja merupakan persoalan penting lain yang ikut menghambat perempuan menamatkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Rendahnya angka wajib belajar dan minimnya pengetahuan tentang konsep perencanaan keluarga menjadi penyebab lain pernikahan dini. Upaya peningkatan masa menempuh pendidikan dengan penerapan wajib belajar 12 tahun yang digencarkan pemerintah pada 2015 lalu sendiri masih belum diterapkan secara serius karena tidak ada payung hukum yang mewajibkan pemerintah provinsi dan daerah untuk segera menerapkan.

Tantangan yang dihadapi untuk menurunkan angka perkawinan anak dan juga angka kelahiran pada usia 15-19 tahun adalah: 1) mensinergikan dan mengharmonisasikan peraturan daerah dan kebijakan yang ada; 2) mengubah norma dan nilai dalam masyarakat akan perkawinan dini; 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dan memberi kesempatan lebih besar pada anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; dan 4) meningkatkan cakupan pelayanan pendidikan khususnya di daerah terluar, terpencil dan tertinggal.

Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin. Melemahnya partisipasi dan kontrol perempuan dalam pengambilan kebijakan publik masih terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kuota 30% perempuan yang menduduki jabatan publik baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif secara umum masih belum terpenuhi, kecuali jaksa dan pejabat eselon 3, 4 dan 5.

Perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menduduki jabatan eselon 3 dan eselon 4 meningkat jumlahnya, terutama di Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara eselon 2, menurun dalam lima tahun terakhir, terutama karena restrukturisasi kelembagaan OPD. Data menunjukkan bahwa semakin tinggi jabatan struktural, persentase perempuan justru semakin rendah, meskipun persentase pegawai golongan 3 dan 4 perempuan dengan laki-laki tidak terlalu jauh. Dengan kata lain, isunya bisa jadi bukanlah pada fase rekrutmen pegawai negeri sipil, namun bagaimana skema pengembangan karir memungkinkan perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang dan menduduki jabatan-jabatan strategis.

Problematika kebijakan netral gender, lingkungan kerja yang tidak ramah perempuan, pandangan miring masyarakat terhadap perempuan yang memiliki jabatan/karir lebih tinggi dibanding suami, ditambah dengan masalah internal perempuan yang terperangkap dalam konstruksi gender, seringkali membuat perempuan kurang berani mengambil kesempatan dalam berkarir, maupun meneruskan pendidikan. Perempuan cenderung kurang berani dan memilih aman, memilih rumah tangga dan keluarga sebagai pertimbangan melanjutkan pendidikan ataupun mengejar jabatan.

Penyebab rendahnya persentase perempuan yang menduduki jabatan publik antara lain karena, pandangan masyarakat (termasuk pegawai) bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama, sehingga karir suami menjadi lebih penting dibandingkan karir istri. Pandangan masyarakat (termasuk pegawai) bahwa perempuan kurang berani mengambil keputusan strategis dibandingkan laki-laki,

sehingga laki-laki lebih tepat untuk menduduki jabatan strategis. Disamping itu, menguatnya fundamentalisme tekstualis yang juga menempatkan posisi perempuan identik dengan urusan domestik.

Beban ganda perempuan pekerja dan belum setaranya proses pengambilan keputusan dalam keluarga juga berkontribusi pada rendahnya partisipasi perempuan dalam politik maupun dalam jabatan publik. Perempuan memilih berkarir dengan pertimbangan peran sebagai penanggung jawab urusan domestik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan harian keluarga dan pengasuhan anak. Pendidikan politik di keluarga juga ditengarai tidak cukup mengajarkan anak berpartisipasi (termasuk berdialog dan bernegosiasi) dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam politik harian keluarga, pengambilan keputusan seringkali dilakukan sepihak dan menjadi otoritas orang tua.

Tabel 2.16. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 s.d 2017

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	5	4	4	3
2.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	51	52	49	51
3.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	191	199	191	196
4.	Pekerja perempuan di pemerintah	1.354	1.407	1.403	1.406
5.	Jumlah pekerja perempuan	204.416	224.467	250.771	229.342

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Meningkatnya beban perempuan di ranah produktif dan publik yang tidak diimbangi dengan pembagian peran domestik, menjadikan perempuan tidak memiliki banyak pilihan. Perempuan pekerja yang memiliki penghasilan memadai akan membagi peran domestiknya dengan perempuan lain sebagai asisten rumah tangga (baca PRT). Konsekuensinya tentu membagi penghasilannya untuk 'membayar' berkurangnya beban praktek domestik yang harus dijalani. Pilihan yang lain adalah membagi beban domestik dengan keluarga. Mislanya dalam pengasuhan anak, banyak keluarga yang meminta jasa orang tuanya untuk mengasuh anak selama perempuan menjalani peran produksinya. Pada posisi perempuan sebagai pengambil kebijakan, beban ganda semakin 'mengikat' karena pandangan masyarakat bahwa setinggi apapun karir perempuan, dia tetap harus menunjukkan keteladanan sebagai perempuan yang tidak meninggalkan peran yang pada banyak pihak termasuk perempuan sendiri masih menganggap bahwa peran domestik adalah kodrat yang harus dijalani sebagai perempuan.

Dukungan bagi kepemimpinan perempuan masih terbatas, termasuk dari perempuan maupun dari keluarga. Tingginya jumlah calon legislatif perempuan yang tidak sebanding dengan jumlah anggota legislatif perempuan memperlihatkan bahwa di satu sisi, perempuan masih menjadi pelengkap prasyarat kuota 30%, kurangnya modal (baik kapasitas internal, modal, dan pengalaman) yang dimiliki perempuan menjadi peluang bagi lawan politik, baik yang berasal dari partai yang sama ataupun

partai lain. Hal ini juga menggambarkan bagaimana pendidikan politik dalam keluarga tidak cukup mendorong perempuan untuk menjadi pemimpin dan memilih karir profesional maupun politik.

Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pengguna alat kontrasepsi tahun 2016 didominasi oleh perempuan. Sebanyak 44 % alat kontrasepsi yang dipilih adalah suntik; 25 % IUD; 11 % menggunakan pil; masing-masing 7% untuk metode kontrasepsi implant dan kondom; 5% untuk MOW, dan pengguna paling sedikit adalah MOP sebanyak 1%.

Namun demikian, yang menggembirakan adalah jumlah pengguna alat kontrasepsi laki-laki meningkat dari tahun 2015, yakni menjadi 32.898 dari 32.404 akseptor. Kabupaten dengan tingkat penggunaan alat kontrasepsi untuk laki-laki cukup tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya adalah Bantul (9.609 akseptor). Di lain sisi, peserta KB perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 398.915 akseptor di tahun 2016 setelah sebelumnya berjumlah 399.014 akseptor.

Hal tersebut menunjukkan pengetahuan tentang alat kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan kepemilikan anak hanya dititikberatkan kepada perempuan. Sekali lagi, perempuan secara langsung memang menunjuk kepada salah satu dari dua jenis kelamin, tetapi di kehidupan sosial diposisikan hanya pada urusan domestik, walau pada dasarnya kesehatan dan proses reproduksi adalah tanggung jawab semua orang tanpa membedakan jenis kelamin. Di banyak tempat, perempuan tidak banyak mendapatkan pengetahuan tentang informasi kesehatan reproduksi sekaligus penyakit penyerta yang bisa mempengaruhi kesehatan ibu. Bahkan perempuan kerap menjadi “korban” atas kuasa yang timpang dari suami atau keluarga.

Meningkatkan Penggunaan Teknologi. Berdasarkan data dari UNICEF, stereotip terefleksi dalam cara siswa memilih spesialisasi dalam menempuh pendidikan. Sebagai contoh, ilmu sosial umumnya diambil oleh pelajar perempuan sementara bidang teknologi lebih banyak dipelajari oleh pelajar laki-laki. Baik laki-laki atau perempuan kerap mendapat label negatif ketika mengambil spesialisasi tak umum. Kondisi ini akan terlihat pada jenjang lebih tinggi ketika pelajar mulai memilih jurusan dan konsentrasi yang diambil. Dengan stereotip tersebut, kesempatan perempuan mengembangkan kapasitas dan berkontribusi di bidang-bidang teknologi menjadi terbatas.

Di luar itu, perempuan juga banyak yang melakukan usaha sendiri, dalam jumlah yang lebih banyak dibanding laki-laki yang mengerjakan hal yang sama. Pada tahun 2015 misalnya, sebanyak 50,63% perempuan memiliki usaha sendiri, jumlah yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang sebanyak 49,37%. Usaha sendiri ini, banyak dilakukan perempuan, seperti usaha warung, membuat usaha produksi makanan rumahan, hingga modiste/usaha jahitan. Namun juga, dengan berkembangnya teknologi, banyak perempuan yang sekarang melakukan bisnis online: dari menjual baju, sepatu, pakaian bayi, makanan siap saji, sepatu, bahkan hingga perlengkapan rumah tangga.

Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan.

Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi anggaran umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang sudah dikembangkan adalah Perencanaan dan Penganggaran

yang Responsif Gender (PPRG). Saat ini BPPM telah mengembangkan sebuah aplikasi penganggaran bernama "Sipager". Aplikasi berbasis online ini diharapkan akan lebih memudahkan berbagai perangkat daerah baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kabupaten/kota untuk dapat menyusun penganggaran yang responsif gender. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PPRG sudah diterapkan sejak RPJMD 2012-2017 dan RPJMD 2017-2022, dimana semua perangkat daerah di dalam menyusun kegiatan harus berbasis gender minimal 10 kegiatan untuk setiap perangkat daerah.

F. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Persentase keluarga yang memiliki akses terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) pada tahun 2017 di kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun 2017, namun terdapat juga daerah yang mengalami penurunan seperti terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Belitung Timur. Dari 7 kabupaten/kota, terdapat 3 kabupaten yang realisasinya di bawah target indicator dan rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur yang tidak mencapai 75, sementara dua kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan Bangka yang berada di bawah rata-rata provinsi. Hanya Kota Pangkalpinang dan Kota Pangkalpinang yang berada di atas rata-rata provinsi.

Tabel 2.17. Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) Tahun 2013 s.d 2017

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	87,7	87,7	75,3	77,94	78,14
2	Belitung	75,6	75,6	84,5	74,22	76,08
3	Bangka Tengah	48,2	48,2	47,7	56,84	59,52
4	Bangka Barat	87,4	87,4	83,7	89,46	88,82
5	Bangka Selatan	76,4	76,4	59,6	74,75	73,62
6	Belitung Timur	100	100	76,6	76,02	74,97
7	Kota Pangkalpinang	92,0	92,0	87,7	88,70	94,38
Kepulauan Bangka Belitung		80,2	80,2	73,7	77,64	78,66

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

G. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

1. Rasio Elektrifikasi

Ketersediaan energi listrik adalah parameter penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengelolaan energi listrik yang benar dan terarah penting diperhatikan oleh pemda. Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya peran pemda dalam hal pengelolaan sumber daya energi, termasuk di dalamnya sektor ketenagalistrikan. Hal ini terlihat dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu pemda berkewajiban menyediakan dana

pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu.

Berdasarkan data rata-rata rasio elektrifikasi PT. PLN (Persero) Area Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 adalah Rasio elektrifikasi Provinsi Babel sebesar 98,86 % dengan rincian perwilayah, Kota Pangkalpinang sebesar 131,27 %, Kabupaten Bangka sebesar 97,90%, Kabupaten Belitung sebesar 103,98%, Kabupaten Bangka Tengah sebesar 91,33%, Kabupaten Bangka Barat sebesar 90,43 %, Kabupaten Bangka Selatan sebesar 85,68 %, dan Kabupaten Belitung Timur sebesar 88,13 %.

Tabel 2.18. Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Pelanggan	Ratio Elektrifikasi
-1	-2	-3	-4	-5
1	Bangka	79.954	78.273	97,90
2	Belitung	44.722	46.502	103,98
3	Bangka Tengah	45.884	41.908	91,33
4	Bangka Barat	51.434	46.510	90,43
5	Bangka Selatan	50.981	43.681	85,68
6	Belitung Timur	32.707	28.826	88,13
7	Kota Pangkalpinang	50.863	66.769	131,27
Kepulauan Bangka Belitung		356.545	352.469	98,86

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Dari hasil pemetaan seperti tergambar pada tabel di atas, jumlah rumah tangga di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 356.545 KK sedangkan jumlah KK yang menggunakan listrik sebagai penerangan sebanyak 352.469 KK dan sebanyak 4.076 KK tidak menggunakan listrik sebagai penerangan dan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 98,86 %. Secara kewilayahan Kabupaten Bangka Selatan yang terendah Rasio Elektrifikasinya sebesar 85,68% atau sekitar 7.300 KK yang tidak menggunakan penerangan listrik kemudian diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur dengan Rasio Elektrifikasi sebesar 88,13% atau 3.881 KK.

2. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Kebijakan diversifikasi energi atau penganeekaragaman energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang telah dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain dengan pemanfaatan tenaga air, tenaga angin, tenaga surya dan biogas. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di tahun 2015 dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan mikro hidro untuk pembangkit listrik skala kecil terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai kondisi kelistrikan yang kurang baik seperti di pulau-pulau terpencil dan jauh, mendorong pemanfaatan tenaga surya (PLTS) sedangkan untuk wilayah perkotaan dimaksimalkan pemanfaatan bio energi khususnya biogas rumah tangga sebagai

pengganti bahan bakar minyak atau LPG tabung 3 kg bagi lokasi yang mempunyai potensi biogas yang cukup besar.

Di tahun mendatang sesuai dengan RPJMD 2017-2022, Pemanfaatan EBT di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di fokuskan pada pembangunan PLTS (energi surya) terutama untuk wilayah-wilayah terpencil baik dengan menggunakan dana APBD maupun APBN (dana kementerian ESDM). Selanjutnya pemanfaatan energi Bio Mass Dengan luas areal perkebunan besar kelapa sawit seluas ±107.022,94 Ha, memiliki peluang limbah cangkang sawit untuk menghasilkan pembangkit listrik sebesar 26,75 MW dengan asumsi 1 MW daya listrik membutuhkan limbah sawit dari perkebunan seluas 4.000 Ha. Kemudian energi angin, penggunaan pembangkit Listrik Tenaga Angin di daerah pantai selatan Pulau Bangka dan Pulau Belitung adalah lokasi terbaik menurut data satelit. Di daerah seperti ini sistem instalasi pembangkit ini dapat digunakan sebagai pilihan untuk memenuhi sarana pelistrikan setempat, akan tetapi terlebih dahulu harus dilakukan penelitian tentang besarnya potensi angin tersebut. Pengukuran yang dilakukan adalah kecepatan angin, arah angin, dan durasi/waktu dari kecepatan angin. Wilayah yang difokuskan untuk penggunaan energi angin adalah Kabupaten belitung Timur karena memiliki kecepatan angin terbesar terutama di bulan september-oktober sebesar 17 knots dengan tekanan udara terbesar sebesar 1011.3 mb dan 1011.8 mb.

Tabel 2.19. Data Jenis Energi Baru Terbarukan yang eksisting dan dalam tahap perencanaan

Jenis	Eksisting	Daya	Rencana
1	2	3	4
Bio Mass	IPP - PLTBm Listrindo	5 MW	IPP – PLTBm Energi Karya Persada 6 MW (Tempilang)
	IPP - PLTBm Belitung Energi	7 MW	PT. Sumitomo 10 MW
Bio Gas	PLT Biogas Austindo	1,2 MW	PT. Bangka Biogas Synergi (PT. Putra Bangka Mandiri, 2 MW
			PT. Gunung Pelawan Lestari, 1,2 MW
			PT. Gunung Maras Lestari, 3 MW
			PT. Gunung Sawit Bina Lestari, 4 MW
PLTS	PLTS On Grid Belinyu	1 MW	PLTS 5 MW PT Sinergi Energi Baru di pulau Bangka
	PLTS Off Grid Pulau Gersik	40 KW	
	PLTS Off Grid Pulau Celagen	80 KW	
	PLTS Off Grid Pulau Buku Limau	80 KW	
	PLTS Off Grid Pulau Pongok	125 KW	

3. Konservasi Energi

Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Konservasi energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya energi listrik belum dilakukan dilakukan secara optimal. Belum optimalnya konservasi energi dapat terlihat dari konsumsi energi listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana sektor rumah tangga menjadi konsumen terbesar.

Tabel 2.20. Konsumsi Listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (GWH)

No (1)	Kabupaten/Kota (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)	2016 (7)	2017 (8)
1	Rumah Tangga	277.174	314.399	342.916	359.270	390.145
2	Industri	185	215	229	289	374
3	Instansi Pemerintah	2.468	2.670	3.116	3.465	3.773
4	Sarana Ibadah	N.A	5.197	5.647	6.198	6.935
5	Perusahaan	N.A	16.505	18.971	21.958	22.588
6	Lain-lain	N.A	79	2	209	638
Jumlah		298.971	339.065	370.881	391.389	424.142

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Hal ini berdampak pada tingginya elastisitas energi. Elastisitas energi adalah perbandingan antara laju pertumbuhan konsumsi energi dengan laju pertumbuhan ekonomi. Semakin kecil angka elastisitas, maka semakin efisien penggunaan energi. Angka elastisitas energi di bawah 1,0 dicapai apabila energi yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal.

Dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Daerah (RUED), pelaksanaan konservasi energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 12,5% di tahun 2025 dan 24% di tahun 2050. Sebagai upaya mencapai target tersebut, dilakukan pendekatan konservasi energi di berbagai sektor. Pelaksanaan konservasi energi melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai Tahun 2014 diprioritaskan untuk sektor publik yaitu gedung pemerintah, yang dilakukan melalui pelaksanaan audit energi gedung pemerintahan khususnya milik Pemda. Pelaksanaan audit energi tersebut menghasilkan rekomendasi yang berisi arahan untuk melakukan efisiensi dalam pemanfaatan energi listrik. Sampai dengan tahun 2017, pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan melalui kegiatan audit energi sebesar 28% (42 gedung pemerintah terhadap 150 gedung pemerintah).

H. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Secara absolut, nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat (baik menurut harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan). Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku, dalam setahun, mencapai 9,1 triliun rupiah di tahun 2017. Jumlah ini merupakan yang tertinggi dibanding

tahun-tahun sebelumnya. Sementara berdasarkan harga konstan peningkatan nilai PDRB di tahun yang sama mencapai 4,6 triliun rupiah (dan juga terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya). Total PDRB tahun 2017 atas dasar harga berlaku sebesar 119,2 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan sebesar 92,3 triliun rupiah.

Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, atas dasar harga berlaku, menunjukkan komposisi lapangan usaha/sector di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beragam. Tiga lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum; pertanian, kehutanan, dan perikanan. Masing-masing sebesar 13,12%, 10,32%, dan 10,01%. Urutan dari ketiga lapangan usaha tersebut mengalami pergeseran. Pertanian turun dari urutan kedua pada tahun 2016 menjadi urutan ketiga. Sementara lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sebaliknya Pergeseran tersebut sudah bisa diprediksi. Sebab kontribusi lapangan usaha pertanian mengalami tren menurun, sementara urutan di bawahnya (penyediaan akomodasi dan makan minum) terus mengalami tren meningkat.

Khusus Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kontribusinya cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Penyebabnya kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air serta terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Selain itu, SDM pertanian juga cenderung mengalami penurunan, sementara tingkat produktivitasnya juga rendah. Perkembangan nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam tahun 2013 hingga 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.21. Perkembangan Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,91	18,69	19,03	19,06	18,29
B.	Pertambangan dan Penggalian	14,77	14,39	14,06	13,57	11,02
C.	Industri Pengolahan	24,04	23,26	22,63	22,29	20,20
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,09	0,11
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	8,09	8,04	8,18	8,40	9,74
G.	Perdagangan Besar dan EceranMotor	13,86	13,90	13,93	14,07	15,74
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,52	3,56	3,61	3,66	4,19
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,21	2,27	2,25	2,27	2,53
J.	Informasi dan Komunikasi	1,75	1,79	1,85	1,94	1,65
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	1,74	1,74	1,80	1,83
L.	Real Estate	3,11	3,18	3,14	3,12	3,38
M, N.	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,26	0,25	0,29
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,77	4,87	5,08	5,20	6,17
P.	Jasa Pendidikan	2,14	2,19	2,31	2,39	2,8
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,13	1,13	1,16	1,17	1,22
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,62	0,64	0,66	0,71	0,82
	PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya peningkatan kesempatan kerja. Tambahannya kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2013-2016 sebesar 156.329 orang.

Tabel 2.22. Trend Lapangan Usaha dan kesempatan Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

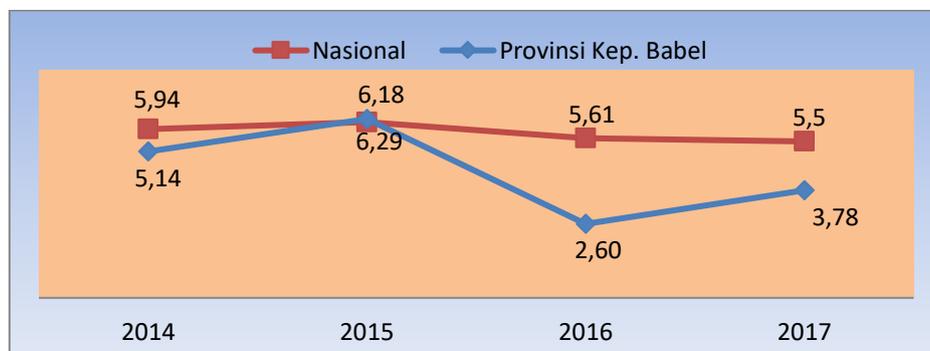
	Lapangan Usaha	Jumlah Tenaga Kerja			Tambahannya Kesempatan Kerja	
		Agt 2015	Agt 2016	Agt 2017	2015-2016	2016-2017
1	2	3	4	5	6	7
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	228578	220.658	219.002	- 7.920	-1.656
B.	Pertambangan dan Penggalian	76399	78.856	91.438	2.457	12.582
C.	Industri Pengolahan	35.853	56.124	44.153	20.271	-11.971
D.	Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.787	6.240	3.070	2.453	-3.170
F.	Konstruksi	28.787	22.041	35.520	- 6.746	13.479
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	109.501	131.935	117.556	22.434	-14.379
H.	Transportasi dan Pergudangan	16.372	16.432	13.710	60	-2.722
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19.569	27.949	23.833	8.380	-4.116
J.	Informasi dan Komunikasi. Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate	9.305	9.072	11.417	- 233	2.345
M, N.	Jasa Perusahaan	6.141	7.114	5.073	973	-2.041
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	34.189	36.292	42.835	2.103	6.543
P.	Jasa Pendidikan	26.611	34.430	25.237	7.819	-9.193
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.219	8.105	12.832	- 2.114	4.727
R,S,T, U	Jasa Lainnya	18.638	31.582	26.942	12.944	-4.640
	JUMLAH	623.949	686.830	672.618	62.881	-14.212

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Penyerapan tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama empat tahun terakhir (2013-2016) masih didominasi sektor pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan dan industri. Sektor pertanian penyerap tenaga kerja tertinggi tetapi mengalami penurunan jumlahnya. Penyebabnya beralihnya fungsi lahan serta minat generasi muda di sektor ini yang menurun. Sektor yang memberikan tambahan kesempatan kerja tinggi adalah perdagangan besar, eceran, rumah makan,

hotel, serta sektor industri pengolahan. Hal ini seiring dengan pertumbuhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai kota pariwisata.

Perubahan kesempatan kerja diikuti turunnya jumlah pengangguran yang rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.



Gambar 2.19. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) Nasional & Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2017

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Meskipun tingkat penganggur terbuka yang rendah, tetapi kualitas kesempatan kerja perlu dicermati. Sebab ketimpangan pendapatan menyebabkan kerentanan sosial akibat tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah yang tidak memadai, dan kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja.

Kecenderungan perubahan perekonomian ikut mendorong peningkatan proporsi penduduk yang bekerja dengan status formal. Penduduk yang bekerja formal jumlahnya lebih sedikit bila dibanding jumlah pekerja informal. Tetapi jumlah ini terus mengalami peningkatan selama tahun 2013-2016. Pada tahun 2013 pekerja formal sebanyak 838.169 orang (bertambah sebanyak 82.800 orang atau 9,88%). Dilihat dari proporsi penduduk yang bekerja secara formal setiap tahunnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dari sebesar 44,44% pada tahun 2013 menjadi 45,09% tahun 2016. Pekerja formal menurut status pekerjaan adalah no. 3 dan 4 pada tabel di bawah. Sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sisanya (nomor 1,2,5,6 dan 7) digolongkan pada sektor informal.

Tabel 2.23. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2014-2017

	Lapangan Usaha	Jumlah Tenaga Kerja			
		Agt 2014	Agt 2015	Agt 2016	Agt 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Sektor Formal	48,96	45,87	44,42	51,62
1	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	5,75	4,27	6,00	6,56
2	Buruh/karyawan/ pegawai	43,21	42	38,42	45,06
B	Sektor Informal	51,04	54,12	55,57	48,38
1	Berusaha sendiri	20,12	21	21,80	22,60

	Lapangan Usaha	Jumlah Tenaga Kerja			
		Agt 2014	Agt 2015	Agt 2016	Agt 2017
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	11,51	13	13,10	10,14
3	Pekerja bebas	6,92	7	6,10	6,06
4	Pekerja keluarga/tidak dibayar	12,49	13	14,57	9,58
	Total	100	100	100	100

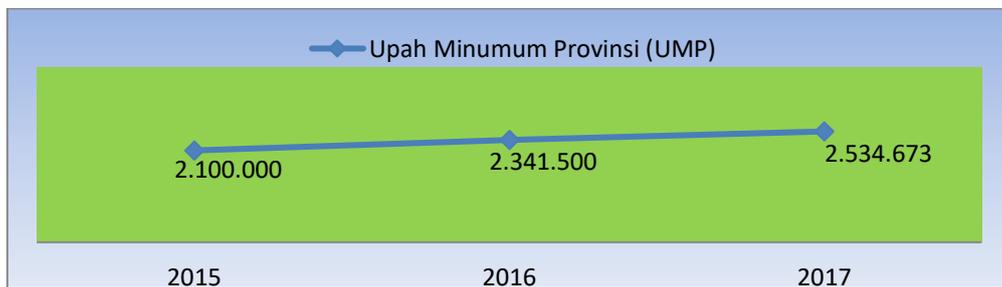
Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Walaupun pekerja informal jumlahnya lebih banyak dari pekerja formal, namun dalam empat tahun terakhir jumlah dan proporsinya terus menurun. Apabila dilihat menurut status pekerjaan, pekerja informal dengan status berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap mendominasi seluruh pekerja informal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan tingkat keaktifannya, proporsi kaum muda berusia 15-29 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan atau tidak dalam pelatihan (*Not in Education, Employment, or Training/NEET*) pada tahun 2016 relatif besar. Jumlahnya sebesar 102.285 orang. Maka pemberian motivasi serta peningkatan pendidikan, pelatihan bagi usia muda masih sangat diperlukan.

Upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan yang menyeluruh perlu dilakukan untuk mendorong kepastian berusaha dan investasi pada pekerja. Termasuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan. Upaya penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan dilakukan dengan mendorong tambahan jumlah pengawas ketenagakerjaan dan peningkatan sarana hubungan industrial.

Melihat rata-rata upah pekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Penyebabnya peningkatan produktivitas serta naiknya Upah Minimum Kab/Kota (UMK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini diharapkan akan mendorong upaya mewujudkan tenaga kerja yang lebih sejahtera.



Gambar 2.20. Upah Rata Rata pekerja per Bulan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2017

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif, antara lain:

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (*skill mismatch* dan *underqualified*);
2. Tingginya jumlah pekerja rentan dan informal dengan tingkat produktivitas dan perlindungan yang rendah;
3. Transformasi struktural pasar kerja yang mengarah pada sektor dengan produktivitas rendah;
4. Efisiensi pasar tenaga kerja yang lemah dalam kerangka daya saing global;
5. Kenaikan upah yang tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja;
6. Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai di tempat kerja;
7. Terbatasnya penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda sektor formal;
8. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan instansi dalam pencapaian target bersama.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Secara umum, keberadaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendominasi perekonomian Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi tahun 2016, jumlah usaha mikro dan kecil mencapai mencapai 98,4 persen dari total usaha/perusahaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaan UMK memberikan keuntungan bagi perekonomian daerah. Pada umumnya UMK menggunakan bahan baku lokal dan pemodalannya yang tidak ditopang dari pinjaman perbankan. Hal tersebut memberikan dampak pada ketahanan UMK terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah maupun kondisi perekonomian global. Namun demikian, untuk mencapai peningkatan pendapatan diperlukan peningkatan skala usaha. Hal tersebut berimplikasi UMK harus keluar dari zona nyaman dan bersaing dengan kompetitor baik dari wilayah lain atau dari luar negeri. UMK perlu memperbaiki produktivitas serta kualitas produk. Untuk memperbesar skala usaha, diperlukan pemodalannya yang cukup sehingga peningkatan akses pembiayaan dari lembaga keuangan diperlukan.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM, Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan positif rata-rata 5% dalam lima tahun terakhir. Tercatat jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 2.206 unit usaha (4,02%) dari semula 238.619 unit usaha pada tahun 2016 menjadi 248.217 unit usaha pada tahun 2017. Apabila dinilai dari aspek jenis usaha, sebaran terbanyak Usaha Kecil Menengah (UKM) berasal dari sektor perdagangan sebesar 28,52% dari total UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah usaha sebanyak 70.794 unit usaha, diikuti oleh sektor Industri Pertanian (27,20%), sektor Industri non Pertanian (22,61%), serta sektor aneka usaha sebesar (21,67%)

Tabel 2.24. Perkembangan Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2013-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah UKM	284.859	286.992	291.322	292.456	293.985

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan variabel penting bagi Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diperlukan bentuk pemasaran pariwisata yang dilakukan secara efektif dan efisien, hal itu dilakukan agar minat dari calon wisatawan ataupun wisatawan *repeater* selalu berminat untuk datang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaan promosi pariwisata adalah salah satu cara efektif dalam mendatangkan serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu pengembangan destinasi wisata juga menjadi unsur penting untuk menarik kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kunci pengembangan destinasi terletak pada 3A (Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas).

Sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan struktur PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, yaitu sebesar 2,53% dan turun dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 2,77 % .



Gambar 2.21. Pertumbuhan Sub Sektor Lapangan Usaha Penyediaan Makan Minum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2017
 Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Destinasi wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih diminati oleh wisawatan nusantara. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang meningkat setiap tahunnya dengan cukup signifikan. Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 236.370 orang, sedangkan pada tahun 2015 kunjungan wisatawan nusantara bertambah menjadi 465.554 orang (naik 96,95%), namun pada tahun 2017 jumlah wisatawan nusantara turun menjadi 362.279 orang.

Tabel 2.25. Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantaradan Mancanegara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Wisatawan Domestik	236.370	369.743	465.554	460.236	362.279
2.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	2.035	3.020	4.690	6.613	7.143
3.	Jumlah	238.405	372.763	470.244	466.876	369.422

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Faktor pendukung dalam pencapaian target indikator jumlah wisatawan nusantara adalah makin beragamnya destinasi wisata baru yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Termasuk wisata yang *booming* melalui media sosial dan semakin bervariasi atraksi wisata. Wisatawan nusantara memiliki kecenderungan datang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tujuan berlibur. Untuk merespon hal tersebut, Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan *stakeholder* pariwisata berupaya untuk menyelenggarakan atraksi-atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan. Semakin banyak event yang dilakukan oleh para pelaku wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan semakin banyak menarik wisatawan nusantara yang berencana untuk berlibur. Atraksi wisata dapat dilakukan dengan menyelenggarakan event-event kepariwisataan dan juga dengan cara membangun destinasi wisata baru. Kedua hal tersebut juga dilaksanakan oleh Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dukungan yang besar dari *stakeholder* pariwisata serta dari masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

I. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan. Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu mencapai 13,12% dari total PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kontribusi tersebut ditopang baik oleh skala industri besar, sedang maupun industri kecil. Dari sisi jenis usaha, kontribusi terbesar ditopang oleh kontribusi golongan industri pengolahan makanan dan minuman dan diikuti oleh industri tekstil dan pakaian jadi. Dari sisi nilai tambahnya, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Walaupun harus diakui pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan mengalami fluktuasi yaitu sempat mengalami penurunan pada kurun waktu 2014-2015 kemudian meningkat kembali pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel 2.26. Nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013-2017 (juta rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nilai PDRB sektor Industri pengolahan	10.143,4	10.270,4	10.400,6	10.688,4	11.363,1
2.	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	3,45	1,25	1,27	2,77	6,31

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017



Gambar 2.22. Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ADHB 4 (empat) sektor terbesar Tahun 2013-2017
 Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Pertumbuhan industri didorong untuk menjadi lebih inklusif dengan cara memberdayakan pelaku industri kecil serta tenaga kerja setempat. Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah IKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan sebesar 308 unit usaha (0,34%) jika dibandingkan tahun 2016. IKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya berkelompok pada suatu wilayah dan membentuk sentra. Geliat kegiatan industri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat terutama dalam aspek budaya. Produk IKM, terutama kerajinan, banyak yang merupakan produk budaya seperti gerabah, batik, wayang dan sebagainya. Pengembangan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya daya saing produk IKM belum optimal, ketersediaan bahan baku, belum optimalnya kualitas produk, keterbatasan kemampuan teknologi IKM, serta keterbatasan dukungan infrastruktur dan sistem logistik.

Tenaga kerja sektor industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Proporsi tenaga kerja sektor industri pada tahun 2013 terhadap total penduduk bekerja hanya 13,45%. Jumlah tersebut meningkat menjadi 15,83% pada tahun 2017. Peningkatan tenaga kerja tersebut terjadi baik untuk pekerja laki-laki maupun perempuan. Bahkan pada tahun 2017, proporsi keterlibatan perempuan dalam sektor industri semakin lebih baik. Pada tahun 2013, proporsi perempuan dalam tenaga kerja sektor industri baru mencapai 47%. Pada tahun 2017, proporsi perempuan dalam tenaga kerja sektor industri sudah hampir mencapai angka 50%.

Tabel 2.27. Penduduk Bekerja Menurut Pada Sektor Industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	2015	2016	2017
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Penduduk bekerja pada sektor industri Sedang dan Besar	8.298	16.264	14.073
2.	Jumlah Penduduk yang bekerja	623.949	686.830	672.618

3	Rasio pekerja di Sektor Industri	0,013	0,024	0,021
---	----------------------------------	-------	-------	-------

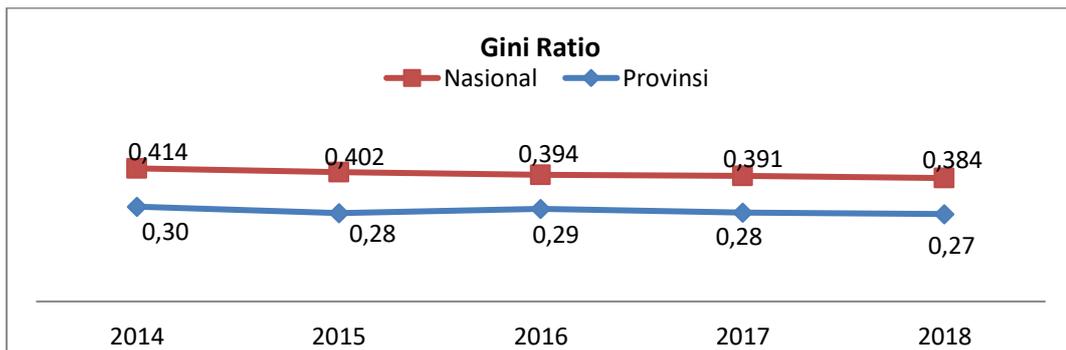
Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

J. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Dalam mendukung pencapaian TPB tujuan 10, yaitu mengurangi kesenjangan, maka target yang ditetapkan, yaitu: (1) Pada tahun 2030 secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional; dan (2) Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. Sebagai pedoman pencapaian target tersebut ditetapkan beberapa indikator, yaitu: (1) Koefisien Gini; (2) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; (3) Desa mandiri berbudaya; (4) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM); dan (5) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. Kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB tujuan ini diuraikan menurut indikator capaian target berikut:

1. Koefisien Gini

Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2017 sebesar 0,28 berada di bawah capaian Nasional sebesar 0,391 dan merupakan provinsi dengan capaian gini ratio terendah se-indonesia. Trend capaian dalam lima tahun terakhir cenderung menurun tahun 2014 sebesar 0,30 menurun menjadi 0,29 tahun 2016 dan tahun 2017 menurun menjadi 0,27.



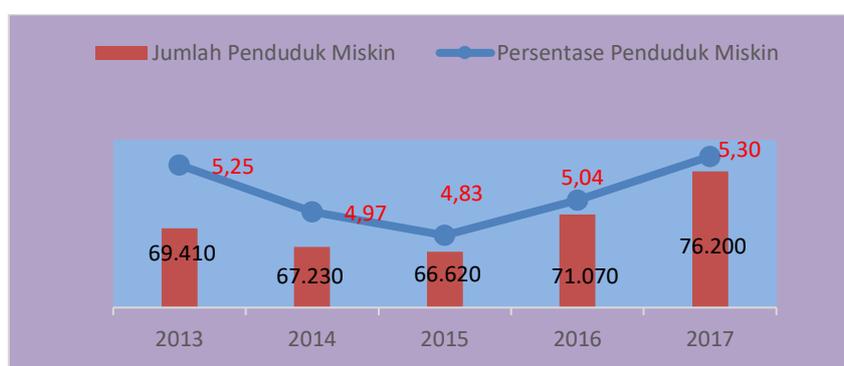
Gambar 2.23. Perkembangan Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013-2017

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

2. Persentase Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Penurunan persentase penduduk miskin merupakan indikator berikutnya dalam pencapaian target tujuan 10 pembangunan berkelanjutan. Jika dilihat dari perkembangannya, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan. Selama 5 tahun terakhir jumlah penduduk miskin cenderung berfluktuasi, tahun 2013 penduduk miskin

sebanyak 69.410 orang menurun pada tahun 2015 menjadi 66.620 orang dan meningkat menjadi 76.200 orang pada tahun 2017. Namun demikian, kemiskinan masih menjadi prioritas dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena tingkat kemiskinan masih berada di atas rata-rata nasional dan berada pada peringkat ke-23 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2017. Selain itu, dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa dan Bali, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah yang paling tinggi. Hal ini diantaranya disebabkan kurangnya infrastruktur yang terbangun di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyebabkan minat investor untuk menanamkan modal masih rendah. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat juga masih terkonsentrasi pada area perkotaan yang menyebabkan ketimpangan investasi antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2.24. Perkembangan Jumlah Orang Miskin dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013-2017 (September)
 Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Menurut kabupaten/kota, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Belitung sebesar 7,77 % tahun 2017 diikuti Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Bangka Tengah dengan masing-masing 6,81 % dan 6,07 %. Sementara itu, tingkat kemiskinan Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan cenderung rendah sebesar 2,98 % dan 3,92 %. Penurunan tingkat kemiskinan terutama di Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang merupakan salah satu tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.28. Tingkat Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2013-2017

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	5.40	5,20	5,63	5,52	5,10
Belitung	8.48	7,36	8,38	7.85	7.77
Bangka Barat	3.26	3,15	3,08	2,74	2,98
Bangka Tengah	5.46	3,27	5,67	5,64	6,07
Bangka Selatan	4.01	3,87	3,74	3,62	3,92

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belitung Timur	6,90	6,68	7,33	6,99	6,81
Kota Pangkalpinang	4,15	4,04	4,97	5,02	4,80
Kepulauan Bangka Belitung	5,25	4,97	5,40	5,22	5,20

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Jika dilihat dari karakteristik kemiskinan di wilayah kabupaten/kota, selama tahun 2013-2017 Kabupaten Belitung dan Belitung Timur memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan provinsi, tetapi pengurangan kemiskinannya di bawah penurunan kemiskinan provinsi. Tantangan yang dihadapi di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang potensial untuk berkembang karena Garis Kemiskinan di Kabupaten Belitung paling tinggi se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan tantangan yang dihadapi di kabupaten Bangka Tengah adalah mendorong pengembangan kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

Tabel 2.29. Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Bangka	5,30	4,81	4,54	4,63	5,04
Belitung	5,96	4,72	4,53	4,97	5,29
Bangka Barat	5,09	4,72	5,03	4,79	5,26
Bangka Tengah	3,3	1,5	0,31	3,05	3,45
Bangka Selatan	4,45	4,44	4,27	4,3	4,57
Belitung Timur	5,7	5,17	4,4	4,25	4,85
Kota Pangkalpinang	5,78	4,27	4,24	5,17	5,19
Kepulauan Bangka Belitung	5,25	5,20	4,67	4,1	4,47

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

K. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Kawasan kumuh masih ditemui di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh sebab itu, kawasan kumuh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tersebut, luasan kawasan kumuh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 966,65 ha.

Tabel 2.30. Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

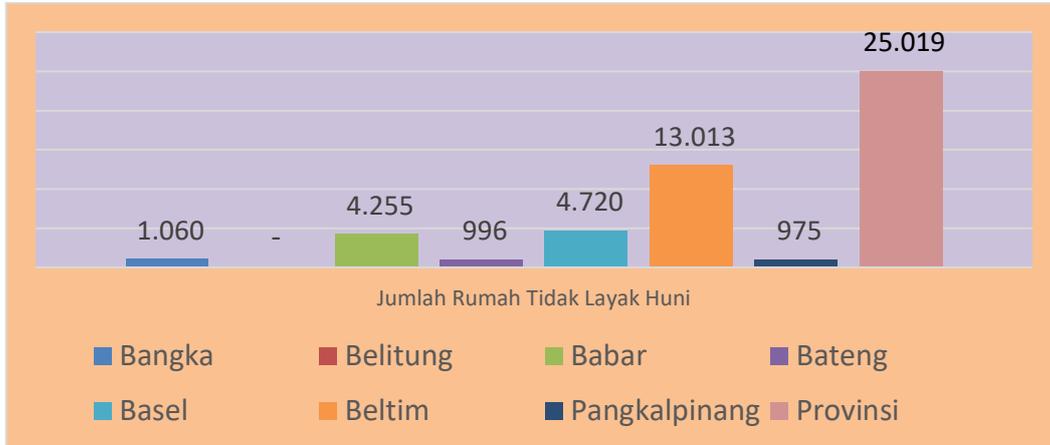
KABUPATEN	LUASAN KAWASAN KUMUH (ha)	DASAR HUKUM
Kabupaten Bangka	81,63	Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/691/BAPPEDA/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/325.5/PU/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka
Kabupaten Belitung	85,86	Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/099/KEP/BAPPEDA/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/605/KEP/BAPPEDA/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Belitung
Kabupaten Bangka Barat	85,28	Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/295/4.3.1/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/391/1.06.01/2014 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Barat
Kabupaten Bangka Tengah	79,58	Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/4183/DPU/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah
Kabupaten Bangka Selatan	40,9	Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/252/BP3MD/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Selatan
Kabupaten Belitung Timur	124,56	Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45.609 TAHUN 2014 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Belitung Timur
Kota Pangkalpinang	187,89	Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 282/KEP/BAPPEDA&LITBANG/IV/2018 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	685,7	

Pembagian wewenang penanganan kawasan permukiman kumuh mengacu pada UU No 23 Tahun 2014, pembagian wewenangnya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah pusat menangani kawasan kumuh dengan luasan lebih dari 15 ha;
2. Pemda provinsi menangani kawasan kumuh dengan luasan 10-15 ha; dan
3. Pemda kabupaten/kota menangani kawasan kumuh dengan luasan kurang dari 10 ha.

Rumah Tidak Layak Huni. Pada tahun 2017, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kota, melakukan pendataan sekaligus penyepakatan mengenai data rumah tidak layak huni yang

akan digunakan sebagai baseline penanganan. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada akhir 2016 berjumlah 65.578 unit.



Gambar 2.24. Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2018

Sumber: Dinas Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemda dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat pun memiliki andil dalam mengatasi permasalahan ini. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan penanganan RTLH melalui beberapa skema pembiayaan yakni APBN, APBD Kab/Kota dan CSR.

L. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan. Penetapan IKLHD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan. Informasi tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban pencapaian target program-program Pemprov di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka menunjang ketahanan air dan pangan, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 adalah “menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang berada pada kisaran 66,5-68,6. Pada saat ini kondisi kualitas air sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun karena pencemaran limbah domestik yang mengakibatkan parameter BOD, fecal coli, dan total coliform melebihi baku Selain itu penurunan kualitas air sungai dan danau disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang berdampak pada ketersediaan air.

1. Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform;
2. Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO₂ dan NO₂;
3. Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Tabel 2.31. Kriteria dan Indikator IKLH

No	Indikator	Parameter	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kualitas Air	TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform	30%
	Kualitas Udara	SO ₂ dan NO ₂	30%
	Kualitas Tutupan Lahan	Luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi	40%

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Indeks Kualitas Air Sungai (IKA). Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sungai-sungai yang dipantau kualitas airnya adalah Sungai Opak, Oyo, Code, Winongo dan Sungai Progo. Data hasil pemantauan kualitas air sungai tersebut dipergunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks Kualitas Udara (IKU). Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM₁₀, PM_{2.5}) dan oksidan/ozon (O₃) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Disamping itu semakin maraknya pembakaran hutan yang melanda hampir di seluruh Indonesia terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan dalam sepuluh tahun terakhir sangat berdampak terhadap penurunan kualitas udara dan menjadi penyebab semakin banyaknya penduduk yang menderita penyakit ISPA. Penyusunan dan penghitungan indeks kualitas udara ditujukan:

1. sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara; dan

2. sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.

M. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk menurunkan indeks risiko bencana khususnya pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi. Dalam komitmen global (TPB), penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pengurangan risiko bencana diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sektor yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan membangun kesiapsiagaan. Hingga akhir tahun 2016, jumlah kejadian bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim masih terus meningkat. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana dari BNPB, terdapat 322 Kabupaten/Kota yang masih berada pada kelas risiko tinggi dan 174 Kabupaten/Kota pada kelas risiko bencana sedang. Hal ini masih menunjukkan bahwa ke depan, upaya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana khususnya di daerah masih terus diperlukan.

Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta dampak perubahan iklim, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjalankan melakukan dua strategi yaitu adaptasi dan mitigasi baik struktural maupun non-struktural melalui program pembangunan yang relevan. Strategi program pembangunan yang relevan, yaitu: (1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; (2) Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana; (3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya mitigasi struktural dan non-struktural, antara lain: (1) meningkatkan kapasitas daerah sehingga dapat menurunkan jumlah korban terkena dampak bencana; (2) meningkatkan koordinasi lintas sektoral bukan hanya saat kondisi tanggap darurat tapi terutama dalam upaya pengurangan risiko bencana; (3) memperkuat kelembagaan dan regulasi terkait PRB dampak perubahan iklim sebagai tindak lanjut dari beberapa regulasi antara lain: Indonesia Adaptation Strategy (Bappenas, 2011), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia (DNPI, 2011), dan *Indonesia Climate Change Sectoral Road Map* (Bappenas, 2010), Rencana Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007), serta Dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), yang disahkan pada Februari 2014 sebagai alat harmonisasi dan operasionalisasi berbagai dokumen kebijakan adaptasi yang sudah ada.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari potensi risiko atau bahaya yang ditimbulkan dari perubahan iklim, Indonesia secara serius dan konsisten terus menjalankan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan melaksanakan program aksi adaptasi perubahan iklim, yang sejalan dengan TPB (TPB/SDGs). Pengarusutamaan penanganan perubahan iklim sebagai agenda pembangunan nasional lintas bidang terus dilakukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam jangka menengah (RPJMN 2015-2019) dan perencanaan pembangunan tahunan (RKP). Selain itu,

Indonesia juga berperan aktif dalam melaksanakan komitmen global dalam penanganan perubahan iklim. Secara reguler, dokumen bukti kontribusi terhadap penanganan perubahan iklim disampaikan ke UNFCCC, baik dalam bentuk *National Communication* maupun *Biennial Update Report* (BUR).

Untuk mewujudkan target penurunan emisi gas rumah kaca, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). RAN-GRK memiliki kerangka kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam penurunan emisi GRK sebesar 26% (skenario fair/menggunakan kemampuan sendiri) dan sebesar 41% (skenario ambisius/jika mendapat dukungan internasional) pada bidang berbasis lahan, energi dan pengelolaan limbah dalam kurun waktu 2010-2020. Perpres tersebut mengamanatkan Pemda wajib untuk menyusun RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Komitmen tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 29% (skenario *fair*) dan 41% (skenario ambisius) untuk tahun 2030.

N. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Penyusunan Tata Ruang Laut. Indonesia sudah memiliki landasan pengelolaan sumberdaya kelautan melalui UU No. 32/2014 tentang Kelautan dan UU No. 27/2007 jo. UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan tersebut mengamanatkan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Maksud RZWP3K adalah mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan terintegrasi melalui:

(i) peningkatan perlindungan terhadap lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; (ii) perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya maritim, masyarakat adat, dan nelayan tradisional; (iii) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan kemaritiman, serta (iv) memberi kepastian hukum untuk mendorong investasi.

Melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan ruang laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang mencakup hingga 12 mil dari garis pantai diukur dari pasang tertinggi. Pada akhir 2017, Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang dalam tahap penyusunan RZWP3K dan ditargetkan pada Tahun 2020 sudah dapat diperdakan. Seiring dengan proses penyusunan RZWP3K, Pemda Provinsi sedang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RZWP3K pada tahun 2018.

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Laut Berkelanjutan. Untuk mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, Indonesia telah membagi manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2014. Untuk membentuk kelembagaan WPP sebagai *platform* kawasan pengelolaan usaha perikanan yang mandiri, diperlukan struktur dan mekanisme

tata kelola yang tepat, efektif dan efisien untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang baik (*good fisheries management*). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam WPP RI 573 yang termasuk selatan pulau Sumatera.

Penangkapan Ikan Dalam Batasan Biologis yang Aman. Indonesia secara konsisten melakukan pemutakhiran angka pendugaan kelimpahan ikan (*stock assessment*) dilaut, untuk menduga nilai Potensi Maksimum Lestari (*Maximum Sustainable Yield/MSY*) dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch/TAC*). Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah sebesar 80% dari potensi maksimum lestarnya. Pada tahun 2013, MSY ditetapkan sebesar 7,3 juta ton (Renstra KKP 2015-2019, Permen KP No.25/2015); selanjutnya pada tahun 2016, ditetapkan nilai MSY sebesar 9,9 juta ton (Kepmen KP No.47/2016); dan terakhir pada tahun 2017, nilai MSY meningkat menjadi 12,5 juta ton (Kepmen KP No.50/2017). Peningkatan nilai MSY ini diiringi dengan pembaruan pencatatan data khususnya tentang ketertiban pengumpulan data di seluruh tempat pendaratan ikan, pencatatan kapal, perbaikan metodologi perhitungan, dan masuknya spesies baru yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng Dinas Kelautan dan Perikanan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan pembuatan *Log Book* perikanan dan *Vessel Monitoring System* yang kemudian masuk dalam sistem satu data.

Tabel 2.32. Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perikanan Tangkap (persentase)	18,81	19,20	13,18	18,57	19,64
a	Potensi Produksi (ton)	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
b	Produksi (ton)	199.241,40	203.284,40	139.632,96	196.704,00	208.019,7
2.	Perikanan Budidaya (persentase)	0,22	0,32	0,33	0,35	0,29
a	Potensi Produksi (ton)	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000
b	Produksi (ton)	2.939,12	4.198,62	4.305,29	4.618,87	3.844,97

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Penegakan hukum dan pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* terus ditingkatkan. Pemberantasan IUU *fishing* merupakan masalah yang memerlukan komitmen tinggi dan kerjasama lintas institusi pada tingkat operasional. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan terluas di dunia, telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memerangi IUU *fishing* di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 j.o Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam rangka mendukung pemberantasan IUU *fishing*, Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk tim pengawasan terpadu dari Lanal, Polair, Dishub Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas terkait lainnya yang tugasnya mengawasi di perairan laut dan daratan. Selain itu diperlukan pelibatan inklusif semua pelaku perikanan dalam memanfaatkan potensi perikanan secara *legal, reported dan regulated*.

Dukungan dan Perlindungan Nelayan Kecil. Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Beberapa dukungan dalam peraturan tersebut untuk nelayan kecil adalah (a) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (b) memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (c) meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (d) menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (e) menumbuh kembangkan sistem, serta kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (f) melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan (g) memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Hibah untuk nelayan skala kecil juga terus ditingkatkan berupa peralatan tangkap, kapal, pelatihan dan sosialisasi/pembinaan. Adapun tantangan yang perlu diatasi dalam memberikan bantuan kepada nelayan kecil adalah perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan operasionalisasi, penguatan kelembagaan nelayan, penyusunan regulasi yang tepat dalam mengatur pemanfaatan bantuan pendanaan dan bantuan teknis bagi nelayan skala kecil.

O. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem

Daratan

Kinerja Tata Kelola Kehutanan. Peningkatan kinerja tata kelola kehutanan dilaksanakan melalui pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kehadiran KPH sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan hutan di tingkat tapak, yaitu *illegal activities (logging, hunting, encroaching)*, pencurian plasma nutfah, kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di dalam kawasan hutan yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan. Upaya lainnya untuk peningkatan kinerja tata kelola kehutanan adalah dengan peningkatan aset kehutanan melalui upaya restorasi dan rehabilitasi untuk meningkatkan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.

Pada tahun 2017, pemanfaatan sumberdaya hutan tercatat sebesar 36,09%. Pemanfaatan sumberdaya hutan pada tahun 2017 berupa pemanfaatan hutan untuk produksi minyak kayu putih dan produksi kayu. Dari luas total hutan sebesar 18.715 ha sebesar 6.753,76 ha (terdiri dari 3.771,26 ha untuk produksi minyak kayu putih dan 2.985,50 ha untuk produksi kayu). Pemanfaatan tersebut hanya dilakukan di area hutan produksi yang memang diperuntukkan untuk produksi minyak kayu putih dan produksi kayu. Pada tahun 2017 luas pemanfaatan hutan secara optimal.

Tabel 2.33. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013 - 2017

Luas Kawasan Hutan	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hutan Produksi	432.882,82	432.882,82	432.882,82	432.882,82	436.647,89
Hutan Lindung	189.965	189.965	189.965	189.965	184.276,95
Hutan Konservasi	35.473	35.473	35.473	35.473	35.750,84
Hutan Produksi Konversi	692,58	692,58	692,58	692,58	692,58
Jumlah	659.014,58	659.014,58	659.014,58	659.014,58	657.378,26

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Secara umum, pemanfaatan hutan untuk produksi minyak kayu putih dan produksi kayu dapat dilakukan pada area seluas 10.117 ha atau sebesar 54,06% dari luas hutan keseluruhan dengan catatan kondisi tanaman seluruhnya pada kondisi normal dan produktif. Namun pada kenyataannya keadaan tanaman dengan kondisi normal hanya tercatat seluas 3.087,20 ha yang terdiri atas tegakan jati dan rimba seluas 2.985,50 dan tegakan kayu putih seluas 104,70 ha. Pada tegakan kayu putih dengan kondisi bertumbuhan kurang juga dilakukan pungutan daun untuk produksi minyak kayu putih seluas 3.666,56 ha. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target produksi minyak kayu putih.

Tantangan besar dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan adalah kondisi tegakan yang mayoritas berupa tegakan bertumbuhan kurang sehingga pemanfaatan sumberdaya hutan dalam hal ini untuk produksi kayu dan minyak kayu putih tidak bisa dilakukan secara optimal. Selain itu masih terdapat kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain diluar kepentingan kehutanan sehingga menghambat upaya pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal.

Kasus pencurian kayu tertinggi dalam kurun waktu 2012-2016 terjadi pada tahun 2014, yaitu sebanyak 81 kasus dengan volume kayu yang dicuri sebanyak 353 meter kubik. Luas areal hutan yang terbakar terbesar selama kurun waktu 2012 – 2016 terjadi pada tahun 2015 yaitu seluas 128,5 hektar, sedangkan pada tahun 2016 tidak terjadi kebakaran hutan. Jumlah titik lokasi kebakaran hutan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 19 titik. Di sisi lain, deforestasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 40,49 hektar, sedangkan pada tahun 2016 hanya sebesar 0,42 hektar. Penurunan kerusakan hutan diwujudkan melalui peningkatan upaya perlindungan dan pengamanan hutan. Selain itu, didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka peningkatan pendapatannya melalui skema tumpangsari maupun pola kerjasama lain.

Tantangan utama dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati terutama sumberdaya hutan adalah tingginya kebutuhan lahan oleh masyarakat sekitar hutan yang memunculkan penyerobotan lahan hutan atau penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang relatif rendah sehingga memunculkan gangguan hutan terutama pencurian kayu. Tindakan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan arti penting kelestarian hutan berkaitan dengan kelestarian sumberdaya alam hayati dan

ekosistemnya, serta meningkatkan upaya perlindungan kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan.

Indeks Tutupan Hutan. Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Penghitungan ITH dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Dalam perhitungan ITH ini, diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,3% dari luas wilayah administrasinya). Asumsi yang digunakan dalam penghitungan ITH, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai ITH tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya.

P. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan. Dalam mencegah dan menurunkan kekerasan terhadap anak dan perempuan, BPPM melakukan dua strategi yaitu pembuatan kebijakan dan program pembangunan yang relevan. Strategi pembuatan kebijakan, antara lain: (1) Perda Nomor 3/2012 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; (2) Pergub Nomor 66/ 2012 Forum perlindungan korban kekerasan; (3) Pergub Nomor 67/2012 tentang organisasi dan tata kerja P2TPA RDU; (4) Pergub Nomor 34/2013 tentang RAD perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2013-2017; (5) Perda Nomor. 6/2014 tentang Perlindungan terhadap korban TPPO, (6) Perda Nomor. 2 tahun 2018 tentang Pelindungan anak; (7) Penyusunan Perda Ketahanan Keluarga

Strategi program pembangunan yang relevan, antara lain: (1) peningkatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor pencegahan kekerasan; (2) pelayanan Telepon Sahabat Anak (TeSA). Layanan ini berupa saluran telepon yang beroperasi selama 24 jam 7 hari untuk menerima berbagai aduan terkait kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak; (3) penguatan sistem perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas SDM pada institusi yang mencakup pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah dengan pengembangan dan penguatan program kesejahteraan sosial anak–integratif dan penguatan; (4) penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan didukung Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA);

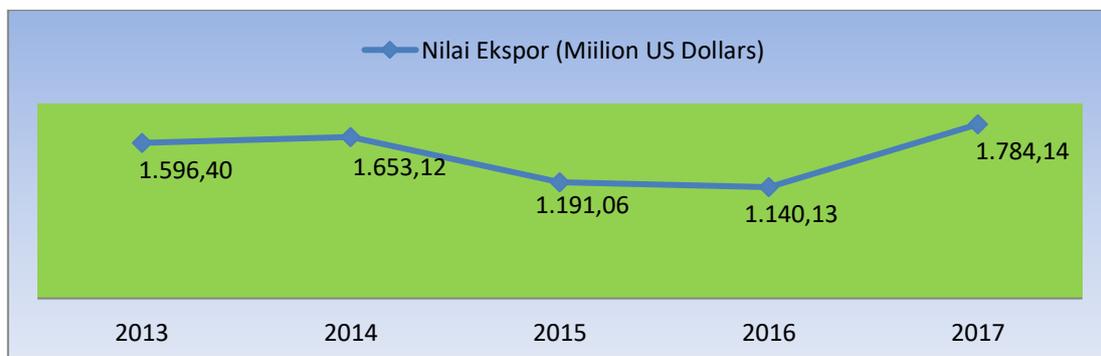
pengembangan program untuk pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah dengan mempromosikan penggunaan disiplin positif bagi guru dan pengembangan program pencegahan

perundungan (*anti-bullying*); (6) penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat untuk pencegahan dan deteksi dini kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran melalui peningkatan peran dunia usaha, media massa dan masyarakat dalam penguatan pengasuhan berbasis keluarga dan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); serta (7) peningkatan partisipasi masyarakat termasuk anak-anak melalui pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak dan Forum Anak.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kekerasan dan angka kematian, antara lain: (1) peningkatan kualitas layanan untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; (2) penguatan perlindungan anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; dan (3) peningkatan koordinasi dari para pemangku kepentingan untuk melindungi anak dan perempuan

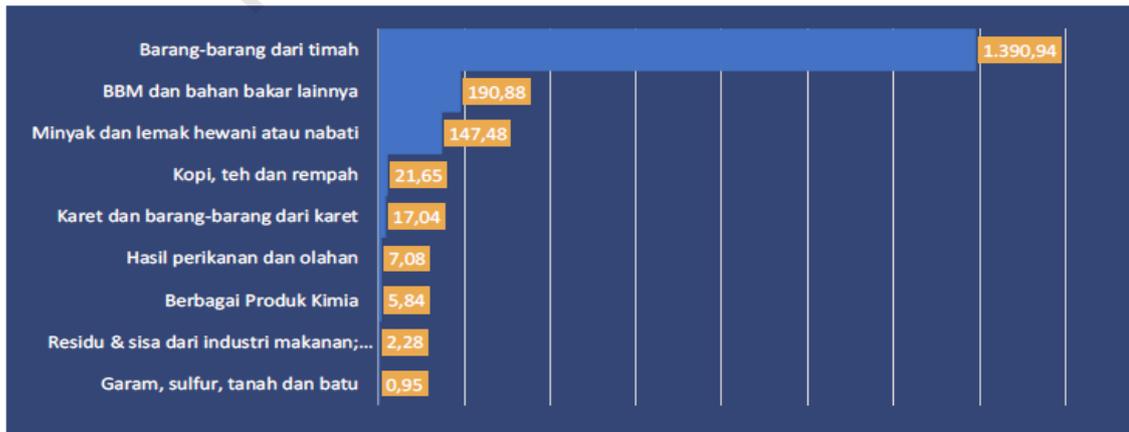
Q. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Keterbukaan ekonomi memberikan manfaat bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui perdagangan antar negara. Secara umum, perkembangan ekspor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Dalam tiga tahun terakhir, kinerja sektor perdagangan mulai membaik dan tercatat surplus karena terpengaruh oleh pulihnya kondisi perekonomian global. Tercatat, Nilai Ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 296,61 Juta US\$. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 44,43 Juta US\$ (17,62%) jika dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sebesar 252,18 Juta US\$. Peningkatan ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh 5 (lima) komoditas utama ekspor Timah, BBM dan Bahan bakar lainnya, Minyak kelapa sawit (CPO), Lada, dan Karet. Sementara tujuan utama ekspor komoditas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Australia, Singapura, Malaysia, Tiongkok dan Bangladesh.



Gambar 2.25. Perkembangan Ekspor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2013-2017

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017



Gambar 2.26. Ekspor terbesar menurut kelompok komoditi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2017

Sumber: BBDA Dalam Angka 2017

Kemitraan untuk mencapai TPB diwujudkan melalui kerjasama pada level internasional. Pada sasaran global, target pembangunan adalah memperkuat mobilisasi sumber daya domestik termasuk mencari dukungan internasional untuk peningkatan kapasitas lokal. Pada sisi perkuatan sumber daya domestik, Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi, dan pada sisi kerjasama internasional Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diuntungkan dengan adanya kerjasama dengan beberapa negara maju di dunia.

Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pemerintah Prefektur Yamanashi, Jepang pada tanggal 24 November 2016. Kerjasama dilakukan dalam bidang pertanian selama 3 tahun (dari tahun 2018 hingga 2021). Skema kerjasama dilakukan dengan pemagangan tenaga pertanian dari pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di prefektur Yamanashi untuk belajar tentang budidaya tanaman anggur dan stroberi.

Serangkaian kerjasama dalam bentuk *sister province* juga dilaksanakan dengan pemerintah Australia (khususnya negara bagian Victoria) dalam bidang seni dan kebudayaan. Kerjasama pun dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Gangwon dan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Kegiatannya adalah *“Gangwon Provincial Program for Local Government Officials of Sisterhood Governments”* dan *Saemaul Undong Program*. Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kualitas hidup, peningkatan pendapatan, aktivitas relawan dan pengenalan budaya Korea.

A. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan



Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara, maka penghilangan kemiskinan dan kelaparan pada 2030 menjadi tulang punggungnya. Kemiskinan, yang menjadi tujuan utama MDGs, kembali menjadi tujuan utama dalam TPB. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs.

Berdasarkan evaluasi dan monitoring pencapaian RAD MDG's Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2015, Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencapai target di mana pada tahun 2015 tingkat kemiskinan sebesar 4,83 % melampaui target sebesar 7,55%. Sedangkan untuk indeks kedalaman Kemiskinan cenderung berfluktuasi, tahun 2012 sebesar 0,66 turun menjadi 0,60 tahun 2014 namun pada tahun 2015 meningkat menjadi 0,67 %. Secara keseluruhan untuk tujuan I tanpa kemiskinan dengan indikator Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Nasional capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup baik namun perlu kerja keras karena terjadinya peningkatan dimana tahun 2015 sebesar 4,83 % dan meningkat tahun 2017 menjadi 5,30 % tetapi masih di bawah capaian nasional sebesar 10,12 %.

Persoalan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan menyangkut beberapa hal antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Kebijakan Tujuan 1. Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan, RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan dengan arah kebijakan yaitu :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 1 tanpa kemiskinan, program dan kegiatannya mencakup:

1. Program penanganan farkir miskin;
2. Program pembangunan perumahan;
3. Program pelayanan kesehatan;
4. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan pendidikan menengah atas;
5. Program peningkatan kualitas hidup perempuan;
6. Program pengembangan perdagangan;
7. Program pengembangan informasi dan komunikasi publik
8. Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9. Program peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan Industrial dan jaminan sosial.

Target Indikator Tujuan 1. Target pencapaian indikator Tujuan 1 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan									
Target Global 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional									
01.02.01	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Susenas BPS	%	5,3	5,22	5,15	5,10	5,05	5,00
Target Global 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinkes Provinsi	Jiwa	907,997	1.050.000	1.200.000	1.275.000	1.325.000	1.385.000
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Disnaker Provinsi	Jiwa	-	2.049	2.085	2.110	2.147	2.183
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dinsos Provinsi	Org	42.942	43.000	43.000	43.000	43.000	43.
Target Global 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro									
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Susenas BPS	%	87,78	87,95	88,15	88,30	8850	88,62
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Susenas BPS	%	58,33	59,34	60,15	60,85	61,12	61,36
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Susenas BPS	%	60,17	62,15	63,28	64,05	64,78	65,26

RENCANA AKSI DAERAH SDG'S

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Susenas BPS	%	61,42	63,15	64,74	65,12	66,45	67,10
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Susenas BPS	%	75,39	75,87	76,28	77,10	77,95	78,25
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Susenas BPS	%	3,41	3,27	3,18	3,07	3,02	2,96
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Susenas BPS	%	96,07	96,35	96,52	96,72	96,86	97,05
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Susenas BPS	%	70,30	70,64	70,85	70,96	71,15	71,35
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Susenas BPS	%	53,47	53,64	53,75	53,87	53,95	54,10
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Susenas BPS	%	82,18	83,25	84,30	85,25	86,24	86,75
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Susenas BPS	%	98,87	99,50	100	100	100	100
Target Global 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana									
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan risiko bencana daerah	BPBD Provinsi	lokasi	5	1	1	1	1	1

B. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan



Tujuan 2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan target yang diukur melalui indikator.

Target tersebut adalah menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Upaya perbaikan gizi masyarakat diantaranya adalah: (1) sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif; (2) peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, *hygiene*, dan pengasuhan; (3) pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal (termasuk sosialisasi manfaat dan menciptakan minat atau preferensi pada konsumsi pangan ikan, hasil peternakan, sayuran, dan buah-buahan lokal); (4) perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan; (5) penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi dan keamanan pangan; (6) penguatan integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil; (7) perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja perempuan, dan kelompok rawan gizi lainnya; (8) penguatan sistem surveilans pangan dan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan; (9) pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); (10) peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat; dan (11) penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis (berpendapatan rendah) dan transien (darurat bencana).

Kebijakan Tujuan 2. Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kelaparan, RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan dengan arah kebijakan yaitu :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
2. Pemenuhan kecukupan pangan dan gizi masyarakat
3. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 2 tanpa Kelaparan, program dan kegiatannya mencakup:

1. Program kesehatan masyarakat;
2. Program peningkatan konsumsi dan keamanan pangan;
3. Program ketersediaan dan kerawanan pangan;
4. Program keciptakaryaan dan permukiman;
5. Program pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
6. Program pengembangan peternakan dan kesehatan hewan;
7. Program pengembangan informasi dan komunikasi publik;
8. Program pengembangan perikanan tangkap;
9. Program pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan

Target Indikator Tujuan 2. Target pencapaian indikator Tujuan 2 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 2 Tanpa Kelaparan									
Target Global 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun									
2.1.1*	Prevalensi ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	BPS		13	13	13	13	13	13
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	BPS	%	16,70	16,36	16,06	15,78	15,41	15,15
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	BPS	%	6,6	6,53	6,35	6,17	6,10	6,0
Target Global 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	BPS	%	18	17,75	17,35	17,10	16,74	16,36
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	BPS	%	9,3	9,18	9,10	9,0	8,87	8,75
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	BPS	%	7,98	7,84	7,72	7,54	7,35	7,10
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	BPS	%	N.A	12,5	12	11,5	11	10,5
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	BPS	%	42,20	59,25 4	59,35 9	59,45	59,65 9	59,75 3
Target Global 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.									
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	BPS	Rupiah/naker	N.A	60.53 5,15	61.25 0,35	61.85, 12	62,25 0,15	62,85 4,12
Target Global 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.									
2.5.3	Produksi Ternak Besar dan Kecil	BPS	ekor	49.657	49.95 5	50.54 6	51.12 4	52.78 5	53.17 8
2.5.4	Produksi Unggas	BPS	ekor	14.362.17 4	14.42 5.254	14.61 5.125	14.75 8.475	14.95 6.257	15.46 8.126

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
2.5.5	Produksi Perikanan tangkap	BPS	Ton/th	208 019,70	211.5 00	215.0 00	219.3 00	223.3 00	227.3 00
2.5.5	Produksi Perikanan Budidaya	BPS	Ton/th	3.844	7.500	10.30 0	11.20 0	12.10 0	13.00 0

C. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera



Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan

kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat adiktif, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (*tobacco control*), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera didasarkan pada strategi Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan;
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
3. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;
4. Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 3 Kehidupan yang sehat dan sejahtera, program dan kegiatannya mencakup:

1. Program kesehatan masyarakat
2. Proram pencegahan dan pengendalian penyakit
3. Program keciptakaryaan dan permukiman
4. Program pengembangan informasi dan komunikasi publik
5. Program peningkatan konsumsi dan keamanan pangan
6. Program ketersediaan dan kerawanan pangan
7. Program pengembangan sumber daya, fasilitasi dan akses industri
8. Program peningkatan pembudayaan dan peningkatan prestasi olah raga
9. Program pelayanan kesehatan
10. Program peningkatan pelayanan teknis medis dan penunjang medis
11. Program peningkatan pelayanan teknis keperawatan
12. Program peningkatan pelayanan teknis medis kejiwaan dan napza
13. Program peningkatan pelayanan teknis keperawatan jiwa dan napza
14. Program pengembangan sumber daya kesehatan

- 15. Program rehabilitasi sosial
- 16. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan pendidikan kejuruan

Target Indikator Tujuan 3. Target pencapaian indikator Tujuan 3 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera									
Target Global 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka kematian Ibu	Dinkes Prov.		82,46					
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	BPS	%	98,76	98,87	98,97	99,10	99,15	19,20
3.1.2.(a)*	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	BPS	%	90,26	91,25	91,56	91,75	91,85	92,00
Target Global 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000									
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Dinkes Provinsi	%	7,35	7,30	7,25	7,20	7,15	7,10
3.2.2,*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Dinkes Provinsi	%	24/26.021	23/KH	22/KH	21/KH	20/KH	19/KH
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinkes Provinsi	%	6,25	7,2	7,18	7,16	7,14	7,12
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	BPS, DINKES	%	100	100	100	100	100	100
Target Global 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	DINKES	%	0,03	< 0.5%	< 0.5%	< 0.5%	< 0.5%	< 0.5%
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	DINKES	/100.000	99,96	96,25	93,15	91,45	89,65	86,45

RENCANA AKSI DAERAH SDG'S

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	DINKES	/1.000	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	DINKES	Kab/Kota	5	5	5	6	6	7
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	DINKES	%	28,57	57,14	100	100	100	100
3.3.5.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	DINKES	Orang	119	119	119	119	119	119
	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	DINKES	Orang	49	49	49	49	49	49
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	DINKES	Kab./Kota	7	7	7	7	7	7
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	DINKES	Kab./Kota	7	2	5	5	7	7
Target Global 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	BPS, DINKES	%	29,9	29,6	29,3	29,1	28,97	28,95
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	BPS, DINKES	%	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	BPS, DINKES	Kab./Kota	6	7	7	7	7	7
Target Global 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	BNN	jiwa	72	75	80	84	89	82
3.5.1(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	BNN	jiwa	10	10	10	10	10	10

RENCANA AKSI DAERAH SDG'S

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
3.5.1(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	BNN	lembaga	3	3	3	3	3	3
3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN	%	1,49	1,45	1,41	1,37	1,34	1,30
Target Global 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	BPS	%	11,9	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
3.7.2.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	BPS	%	50	34	34	34	34	34
3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR).	BPS		2,3	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Target Global 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang									
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	BPS		3,57	4,85	5,63	6,28	7,35	8,44
3.8.2.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	BPS	/1000	687	780	950	950	950	960
3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPS	%	68,7	78	95	95	95	96
Target Global 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua									
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	DINKES	%	85%	90%	94%	96%	98%	100%

D. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas



Tujuan 4 TPB adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030,

ditetapkan 10 target yang diukur melalui 23 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas didasarkan pada strategi Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat dan Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat, dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan;
2. Peningkatan mutu layanan pendidikan;
3. Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 4 Pendidikan berkualitas, program dan kegiatannya mencakup:

1. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan pendidikan menengah atas
2. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan pendidikan kejuruan
3. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan pendidikan khusus
4. Program peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas guru serta tenaga kependidikan
5. Program peningkatan kebudayaan dan peningkatan prestasi olah raga
6. Program peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda
7. Program pengembangan sumber daya perpustakaan
8. Program pengembangan standarisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
9. Program pengembangan informasi dan komunikasi publik
10. Program peningkatan koordinasi kebijakan pendidikan, KB, dan pemuda

Target Indikator Tujuan 4. Target pencapaian indikator Tujuan 4 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian					
					2018	2019	2020	2021	2022	
Tujuan SDGs : Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas										
Target Global 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif										
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS	%	82,88	82,21	82,64	82,82	82,94	83,05	
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	BPS	tahun	8,13	8,24	8,30	8,34	8,38	8,42	
Target Global 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.										

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS	%	82,88	82,21	82,64	82,82	82,94	83,05
Target Global 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan									
4.4.1.	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS	%	64,4	64,8	65,3	65,8	66,4	66,9
Rasio angka partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.									
4.5.1*	Rasio angka partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/sederajat	BPS	%	57,69	57,86	58	58,15	58,32	58,47
Target Global 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									
4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	97,79	97,76	97,80	97,85	97,91	97,96
4.6.1(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	BPS	%	98,77	99,89	99,95	100	100	100

E. Tujuan 5 Kesetaraan Gender



Isu kesetaraan gender perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program kegiatan, karena isu gender masih cukup mengemuka seperti aktivitas perempuan dalam kegiatan ekonomi masih tertinggal dengan laki-laki, demikian halnya dengan posisi perempuan dalam lembaga politik yang masih rendah dibanding laki-laki. Disektor domestik perempuan masih memikul beban ganda, yaitu mengurus kebutuhan domestik dan masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu kekerasan dalam rumah tangga dimana lebih banyak perempuan dan anak-anak sebagai korban.

Kebijakan Tujuan 5. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022 untuk pencapaian Tujuan 5 Kesetaraan Gender berasal dari kebijakan di berbagai perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

1. Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Menjamin hak anak dalam pembangunan;
3. Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
4. Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 4 Kesetaraan Gender, program dan kegiatannya mencakup:

1. Program peningkatan perlindungan perempuan dan anak

2. Program pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil
3. Program rehabilitasi sosial
4. Program peningkatan kualitas hidup perempuan
5. Program pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil

Selain program di atas masih ada program-program lain yang memberikan kontribusi pada upaya pencapaian target TPB. Dari masing-masing program tersebut kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan TPB dicantumkan dalam matriks-matriks terlampir. Selain Program dan kegiatan-kegiatan yang berasal dari pemerintah, dalam upaya pencapaian target TPB juga didukung oleh program dan kegiatan yang berasal dari organisasi nonpemerintah yaitu dari organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.

Target Indikator Tujuan 5. Target pencapaian indikator Tujuan 5 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 5 Kesetaraan Gender									
Target Global 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun									
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DINAS	Kebijakan	2	2	2	2	2	2
Target Global 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya									
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	BPS	%	100	100	100	100	100	100
Target Global 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan									
5.3.1*	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	BPS	%	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	BPS		21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	BPS	%	50	50,25	50,4	50,6	50,8	60
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS	%	82,88	82,21	82,64	82,82	82,94	83,05
Target Global 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat									

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	BPS	%	6,60	2.17	2.20	2.23	2.26	2.29
Target Global 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.									
5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	BPS	%	10.40	10.15	9.90	9.65	9.40	9.15
5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BPS	%	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	100
Target Global 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan									
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS	%	63,43	63,84	64,24	64,75	65,12	65,54

F. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak



Tujuan 6 adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator.

Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Untuk mewujudkan Tujuan ini, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Strategi: (1) Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku, (2) Meningkatkan penataan kawasan permukiman, (3) meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan, (4) Meningkatkan kualitas air, dan (5) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua adalah:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan;
2. Pengendalian kualitas air
3. Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku;
5. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat;

6. Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi;
7. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 6 Air bersih dan Sanitasi Layak, program dan kegiatannya mencakup:

1. Program keciptakaryaan dan permukiman
2. Program pengembangan sumber daya air
3. Program kesehatan masyarakat
4. Program peningkatan pengendalian dan penataan lingkungan hidup
5. Program peningkatan perlindungan dan konservasi sda dan ekosistem
6. Program peningkatan pengelolaan das dan pemberdayaan masyarakat
7. Program peningkatan tata kelola lingkungan hidup
8. Program peningkatan pengelolaan geologi dan air tanah

Target Indikator Tujuan 6. Target pencapaian indikator Tujuan 6 Air bersih dan Sanitasi Layak yang sebagian bersumber dari data capaian kinerja program dan kegiatan pada tabel berikut :

Target Indikator Tujuan 6. Target pencapaian indikator Tujuan 6 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanita Layak

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 6 Air Bersih dan sanitasi Layak									
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	BPS	%	68,14	68,15	68,52	69,21	69,90	70,42
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	BPS		79,01	79,32	79,52	79,78	79,95	80,1
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	BPS		83,56	85,66	86,34	86,87	87,25	87,85
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DINKES		-	335	390	390	391	391
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DINKES		-	142	164	175	190	200

Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air									
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	ESDM		39	49	58	67	74	79
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.									
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	DISHUT, DLH	Ha	1574	4164	4562	4855	4912	4950

G. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau



Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan

jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global.

Untuk mewujudkan Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada strategi meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah, dengan arah kebijakan:

1. Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;
2. Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, program dan kegiatannya mencakup :

1. Program pengembangan sumber daya energi
2. Program peningkatan pengelolaan geologi dan air tanah
3. Program peningkatan koordinasi kebijakan sumber daya alam

Target Indikator Tujuan 7. Target pencapaian indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau									
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	ESDM	%	97,62	100	100	100	100	100
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	ESDM		631,79	671,19	701,50	735,55	771,12	798,13
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	ESDM	%	79,57	79,60	79,63	79,65	79,67	79,81

H. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi



Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkembang seiring dengan bertambahnya penduduk dan perkembangan teknologi. Selama lima tahun terakhir, perekonomian tumbuh rata-rata sebesar 5,11 % per tahun. Kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari sudut pandang pertumbuhan produksi lapangan

usaha atau kategori ekonomi yang membanggakan. Tahun 2017 landasan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup baik, karena pertumbuhan ekonomi digerakkan terutama oleh kategori-kategori usaha yang mempunyai pangsa besar terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sektor tersebut antara lain pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, informasi dan komunikasi.

Tujuan 8 berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-targetnya meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita; mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi; menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif; penciptaan lapangan kerja layak; mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM); mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET); mempromosikan pariwisata berkelanjutan; memperkuat lembaga keuangan.

Kebijakan Tujuan 8 yang diarahkan untuk pencapaian target-target meliputi : (1) Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan (2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Kebijakan Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak meliputi:

1. Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja;
2. Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan.

Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi meliputi:

1. Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan ;
2. Peningkatan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
3. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian;
4. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUMKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian;
5. Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah;
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian;
7. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan;
8. Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan;
9. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUMKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan;
10. Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan;
11. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;
12. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata;
13. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah;
14. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUMKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan;
15. Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata;
16. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
17. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral;
18. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUMKM dalam meningkatkan daya saing sektor sumber daya mineral;
19. Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral;

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, program dan kegiatannya mencakup:

1. Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
2. Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri;

3. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
5. Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
6. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik;
7. Program Kebinamargaan;
8. Program Pengembangan Sumber Daya Air;
9. Program Peingkatan Pemberdayaan Usaha Kecil;
10. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
11. Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian;
12. Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian;
13. Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
14. Program Pengembangan Perkebunan;
15. Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
16. Program Peningkatan Tata Kelola Hutan;
17. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
18. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
19. Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri;
20. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil;
21. Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
22. Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal;
23. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
24. Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
25. Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri;
26. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata;
27. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
28. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
29. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
30. Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
31. Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam;

Target Indikator Tujuan 8. Target pencapaian indikator Tujuan 8 pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi									

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembangasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	%	4,11	4,30	4,40	4,50	4,60	4,70
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	(juta Rp)	46.457	50.732	53.015	55.401	57.894	60.499
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan									
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS	%	36,13	36,08	36,05	36,01	35,98	35,94
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS	%	51,62	51,66	51,69	51,75	51,79	51,85
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS	%	73,76	73,70	73,66	73,62	73,58	73,55
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	%	14,777	15.124,23	15.958,54	16.865,15	17.895,15	18.865,67
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	3,78	5,70	5,60	5,50	5,40	5,30
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS	%	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan									
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS	persen	21,15	21,85	22,24	22,53	22,85	23,05
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya									
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	DISNAKER	Perse ntase	7,13	2,73	2,73	2,73	3,2	3,2
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS	Org	7.183	7.355	7.475	7.615	7.764	7.948

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baselane (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	BPS	Org	362.992	385.645	398.675	405.175	417.385	428.486

I. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur



Tujuan 9 TPB untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan

tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan *retrofit* industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang telah dijabarkan juga dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, arah kebijakan terkait dengan target mempromosikan industri inklusif dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular;
2. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK);
3. Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat;
4. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai;
5. Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu;
6. Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri;
7. Pemenuhan Energi listrik untuk medorong pengembangan industri berbasis potensi dearah serta peningkatan rasio elektrifikasi;
8. Program Pengembangan Sumber Daya Air;
9. Program Penataan Ruang dan Pertanahan;
10. Program Pengembangan Perhubungan Laut;
11. Program Pengembangan Perhubungan Darat;
12. Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan;
13. Program Kebinamargaan.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, program dan kegiatannya terdiri dari :

1. Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Energi;
3. Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut;

4. Program Kebinamargaan;
5. Program Penataan Ruang Dan Pertanahan;
6. Program Pengembangan Sumber Daya Air;
7. Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik;
8. Program Keciaptakarya Dan Permukiman.

Target Indikator Tujuan 9. Target pencapaian indikator Tujuan 9 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 9 Industri, Inovasi daan Infrastruktur									
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	PUPR	bandara	2	2	2	2	2	2
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	DISHUB	dermaga	3	3	3	3	3	3
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DISHUB	pelabuhan	5	5	5	5	5	5
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	BPS, DISPERINDAG	%	22,72	22,9	23,1	23,2	23,4	23,6
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas.	BPS, DISPERINDAG	%	6,31	4,04	4,75	5,00	5,45	5,85
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas.	BPS, DISPERINDAG	Org	42.623	47.834	48.375	49.565	50.265	50.865
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020									
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	BPS, DISKOMINFO	%	63,43	63,50	63,55	63,60	63,65	63,70
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS, DISKOMINFO	%	28,86	28,90	28,95	29,00	29,05	29,10

J. Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian TPB untuk mengurangi ketimpangan karena sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2017-2022, yaitu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Adapun sasaran dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan mengurangi kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan selama tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut: (1) Koefisien Gini; (2) Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan; (3) Desa mandiri; (4) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Arah kebijakan Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin;
3. Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi;
4. Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi;
5. Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang;
6. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat;
7. Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi;
8. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat;

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 10 berkurangnya Kesenjangan, program dan kegiatannya mencakup :

1. Program penanganan farkir miskin;
2. Program pembangunan perumahan;
3. Program pelayanan kesehatan;
4. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan pendidikan menengah atas;
5. Program peningkatan kualitas hidup perempuan;
6. Program pengembangan perdagangan;
7. Program pengembangan informasi dan komunikasi publik
8. Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Program peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hub. Industrial dan jaminan sosial.

Target Indikator Tujuan 10. Target pencapaian indikator Tujuan 10 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan									
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	poin	0,281	0,278	0,269	0,259	0,250	0,240
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BPS	Persen	5,20	5,25	4,62	5,10	5,05	5,00
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.									
10.3.1.(a)	Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia	BPS	poin	83,07	80,95	81,25	81,75	81,95	82,5
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar									
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPS, BPJS	Org	2.015	2.049	2.095	2.132	2.175	2.200

K. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan



Tujuan 11 adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, melalui RAN TPB ditetapkan 10 target nasional.

Target- target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Untuk mewujudkan Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada sasaran indikator (1) Persentase lingkungan yang tertata; (2) Persentase bangunan yang tertata.

Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2017-2022, menetapkan arah kebijakan pada tujuan 11 sebagai berikut:

1. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat;
2. Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis provinsi;
3. Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
4. Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 11 Kota dan Permukiman berkelanjutan, program dan kegiatannya terdiei dari :

1. Program Keciptakarya dan Permukiman;
2. Program Perumahan Rakyat;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Air;
4. Program Penataan Ruang dan Pertanahan.

Target Indikator Tujuan 11. Target pencapaian indikator Tujuan 11 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Target Pencapaian Indikator Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang berkelanjutan									
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh									
11.1.1.(a)	Jumlah rumah tidak layak huni.	BPS, PUPR	rumah	N.A	25.019	24.100	23.250	22.100	21.000
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua									
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	DISHUB	%	2,10	2,12	2,12	2,15	2,15	2,17
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara									
11.3.2.(a)	Jumlah institusi Pemerintah dan Swasta yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	PERKIM	Institusi	42	42	42	42	42	42
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	PERKIM	lembaga	0	1	1	2	2	3
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.									
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	PERKIM, DISBUDPAR	Kota	2	2	2	2	2	2
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD	poin	162	147	144	140	137	134
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	titik	29	29	29	29	29	29
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk dengan penanganan sampah kota									
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH	persen	83	84	85	86	87	88

L. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab



Tujuan 12 adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pada tahun 2030, pada dokumen RAN ditetapkan 11 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Strategi untuk mencapai Tujuan 12 Menjamin Produksi dan Konsumsi yang Bertanggungjawab di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah: (1) Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan (2) Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan mengurangi limbah (3) Penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/masyarakat mengenai manfaat produk tersebut (4) Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur (5) Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan (5) Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan.

Arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan adalah:

1. Pengendalian kualitas air;
2. pengendalian kualitas udara;
3. Peningkatan tutupan lahan;
4. Pengembangan Perhutanan Sosial;
5. Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, program dan kegiatannya terdiri dari :

1. Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup;
2. Program Peningkatan Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup;
3. Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
4. Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem.

Target Indikator Tujuan 12. Target pencapaian indikator Tujuan 12 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12. Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab									
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan									
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU	DISHUT, DLH	Perusahaan	37	41	45	48	51	53
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DISHUT, DLH	Ton	2.852,4	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
Tagrget 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.									
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DISHUT, DLH	ton	5.254	7.705	8.100	8.375	8.674	8.856

M. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim



Tujuan nasional 13 TPB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan nasional penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim, Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada strategi: (1) Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan (2) Pengurangan resiko bencana, dengan arah kebijakan: (1) Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan (2) Pengurangan resiko bencana secara komprehensif.

Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2017-2022, menetapkan sasaran (indikator) pada tujuan 13 adalah: (1) Menurunnya Indeks kapasitas bencana daerah; (2) Meningkatnya Indeks kualitas air sungai; (3) Indeks kualitas udara; (4) Indeks tutupan lahan; (5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan adalah:

1. Pengendalian kualitas air;
2. pengendalian kualitas udara;
3. Peningkatan tutupan lahan;
4. Pengembangan Perhutanan Sosial;

5. Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, program dan kegiatannya terdiri dari:

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
2. Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana;
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
4. Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup;
5. Program Peningkatan Pengendalian Dan Penaatan Lingkungan Hidup;
6. Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
7. Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem.

Target Indikator Tujuan 13. Target pencapaian indikator Tujuan 13 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Target Pencapaian Indikator Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim									
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional									
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	BAPPEDA	Dokumen	2	2	2	2	2	2

O. Tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan



Tujuan 14 adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 15 indikator. Target - target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU *fishing*, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Kebijakan Tujuan 14. Kebijakan pengelolaan ekosistem lautan yang dilakukan pemerintah telah termuat dalam RPJMD 2017-2022 terkait pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Visi Misi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RPJMD 2017-2022 yaitu “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Tujuan 14 Ekosistem Lautan merupakan bagian dari pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung utamanya bidang

Kelautan dan pesisir dan Bidang Perikanan. Dalam rangka pemeliharaan sumber daya dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan, serta peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan, arah kebijakan pembangunan terkait pengelolaan Tujuan 14 Ekosistem Lautan difokuskan pada dua arah kebijakan utama, yaitu: (1) pengelolaan pesisir serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan (2) pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Arah kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
2. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok;
3. Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik;
4. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga;

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 14 Ekosistem Lautan, program dan kegiatannya terdiri dari :

1. Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut;
2. Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
4. Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi SDA Dan Ekosistem;
5. Program Peningkatan Pengendalian Dan Pnaatan Lingkungan Hidup.

Target Indikator Tujuan 14. Target pencapaian indikator Tujuan 14 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Target Pencapaian Indikator Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 14 Ekosistem Lautan									
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.									
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	DKP	Perda	1	1	1	1	1	1
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	DKP	WPP	1	1	1	1	1	1
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.									
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	DKP	ekor	767.126	767.126	767.126	767.126	767.126	767.126
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia									

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	DKP	Ha	800.571	810.380	825.350	832.458	843.275	852.123
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.									
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	DKP	UMKM	37	45	54	60	68	76

P. Tujuan 15 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Daratan



Tujuan 15 TPB adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem daratan

pada tahun 2030, ditetapkan 12 target yang diukur melalui 25 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan Tujuan 15. Pembangunan kehutanan pada periode 2017–2022 diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu pengelolaan hutan lestari. Perumusan arah kebijakan pembangunan kehutanan dilakukan berdasar analisis pola pemanfaatan ruang (analisis spasial) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan membagi wilayah dalam kawasan-kawasan dengan arah pemanfaatan dan kriteria tertentu. Berdasarkan analisis pemanfaatan ruang, strategi pembangunan kehutanan dititikberatkan pada pembangunan hutan berbasis fungsi hutan yaitu fungsi ekologi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Selanjutnya maka dapat ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan tutupan lahan;
2. Pengembangan Perhutanan Sosial;
3. Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
4. Pengembangan TPA Regional.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 15 Ekosistem Darat, program dan kegiatannya terdiri dari:

1. Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi SDA Dan Ekosistem;
2. Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup;
3. Program Peningkatan Tata Kelola Hutan;
4. Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat;

- 5. Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup;
- 6. Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

Target Indikator Tujuan 15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15. Target Indikator Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 15 Ekosistem Darat									
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.									
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	DISHUT, DLH	%	13,8	12,60	11,57	11,24	10,96	10,74
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.									
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya	DISHUT, DLH	Ha	3.092	3.172	3.252	3.332	3.412	3.492
15.2.1.(d)	Jumlah Penyuluh Kehutanan	DISHUT, DLH	Org	32	32	32	32	32	32
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi									
15.3.1.(a).	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	DISHUT, DLH	Ha	1.574	4.164	5.874	6.945	7.345	7.842

Q. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh



Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*Peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*Justice*) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (*Strong institutions*). Dalam kaitannya dengan

Tujuan 16 nasional ditetapkan 12 target dengan 34 indikator.

Kebijakan Tujuan 16. Tujuan 16 Perdamaian, keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada tiga sasaran utama berikut : (1) mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan melindungi; dan (3) menjalankan peran pemerintah dalam pemenuhan hak sipil bagi warga negara terutama perempuan dan anak-anak.

Dalam rangka untuk mencapai ketiga sasaran utama dari Tujuan 16 arah kebijakannya adalah:

1. Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien;
4. Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Menjamin hak anak dalam pembangunan;
6. Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat;
7. Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh, program dan kegiatannya terdiri dari :

1. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak;
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
3. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri;
4. Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah;
6. Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum;
7. Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan;
8. Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah;
9. Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah;

Target Indikator Tujuan 16. Target pencapaian indikator Tujuan 16 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16. Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh									
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.									
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	BPS, POLDA	kasus	9	9	9	9	9	9
16.1.3.(a)	jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS, POLDA		72	86	80	80	80	80
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS, POLDA		47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									

RENCANA AKSI DAERAH SDG'S

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Sat	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Biro Organisasi	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Biro Organisasi	%	76,2	70	72	73	75	75
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Biro ULP	%	100	100	100	100	100	100
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan									
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	BPS, SETWA N	%	6,60	2,17	2,20	2,23	2,26	2,29
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BPS, BIRO PEMERINTAHAN	%	6,50	6,50	8,7	10,8	13,0	13,0
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	BPS	%	80,11	73,43	74,5	75,7	76,2	77,0
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS	%	83,07	80,95	81,25	81,75	81,95	82,5
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik	BPS	%	82,3	82,30	73,56	75,00	76,00	77,00
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran									
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	BPS	%	82,18	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									
16.10.1.(a)	persentase penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	BPS	%	100	100	100	100	100	100

R. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan



Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh TPB (TPB/SDGs). Hal ini tercermin dari TPB/ SDGs 17 yang memiliki target nasional dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 19 target, 25 indikator global yang di Indonesia dijabarkan ke dalam 32 indikator. Untuk mewujudkan Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan, Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada strategi mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran; Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan, program dan kegiatannya terdiri dari:
 1. Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah;
 2. Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain Lain Yang Sah;
 3. Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri

Target Indikator Tujuan 17. Target pencapaian indikator Tujuan 17 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai tujuan

Kode Indikator	Target/Indikator SDG'S	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan SDGs : Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan									
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1*	Total Pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB	BPS	%	3,37	3,41	3,47	3,52	3,59	3,65
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BPS, BAKUDA	%	0,09	1,06	0,97	1,12	1,18	1,24
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi									
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS	%	28,86	29,45	30,58	31,45	32,27	33,50
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020..									
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	%	31,81	32,5	33,75	34,15	34,87	35,0

Bab IV

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan

Tahapan penting dalam upaya pencapaian target-target TPB adalah pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari siklus pelaksanaan pencapaian di tingkat pusat maupun daerah. Pemantauan dan evaluasi program/kegiatan dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan dan dimulai sejak tahap penyusunan rencana aksi, baik di level nasional maupun daerah.

A. Landasan Peraturan

Berdasarkan Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB (khususnya pada pasal 7 butir b), kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah tugas Tim Pelaksanaan TPB/SDGs. Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Sedangkan untuk pemerintah, landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Agar pelaporan pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dapat berjalan komprehensif, keterlibatan organisasi nonpemerintah - seperti organisasi kemasyarakatan, media, pelaku usaha, filantropi serta akademisi - memiliki peran yang penting dan dapat dilaksanakan menggunakan mekanisme tersendiri.

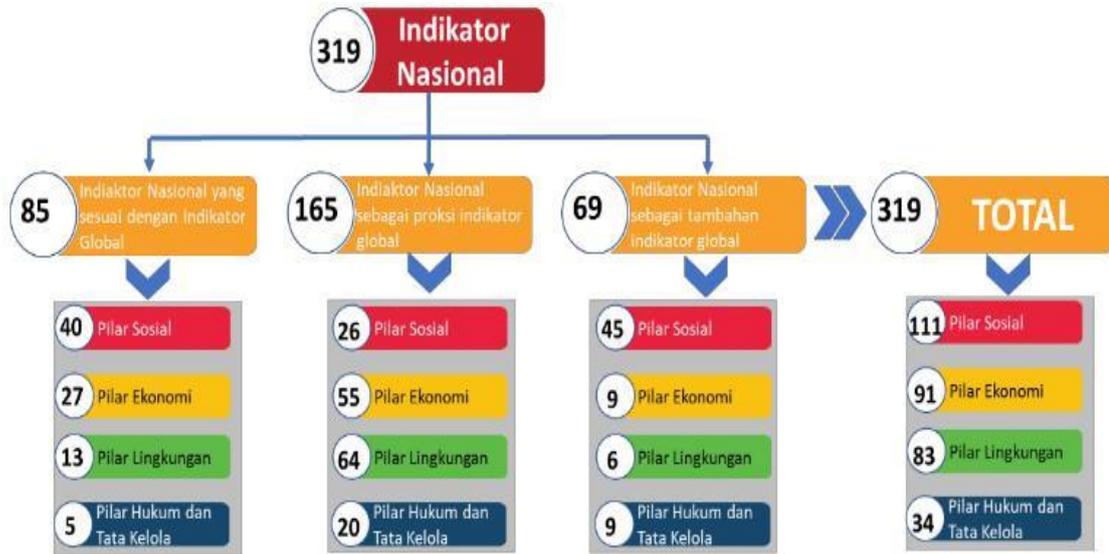
1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Tujuan pemantauan adalah memonitor perkembangan pencapaian TPB/SDGs secara periodik. Kegiatan dilakukan untuk menilai kemajuan pencapaian target berdasarkan indikator yang telah disahkan sekaligus mengidentifikasi dan mengantisipasi hambatan/persoalan yang menghambat pencapaian target. Sehingga dapat diambil kebijakan maupun tindakan untuk mengatasi persoalan sedini mungkin sebelum kompleksitasnya bertambah. Tujuan evaluasi dimaksudkan memberikan gambaran tentang tingkat capaian TPB/SDGs dan memberikan analisis terkait masalah/hambatan serta faktor penyebabnya. Secara ideal, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik/masukan yang tepat untuk penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan yang secara khusus terkait TPB/SDGs.

2. Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Ruang lingkup SDGs meliputi 17 tujuan global dan 37 target daerah yang seluruhnya terkait dengan target nasional yang telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022. Setiap target dilaksanakan oleh perangkat daerah dan

Lembaga pelaksana yang pencapaiannya diukur dengan 106 indikator. Secara menyeluruh, Tujuan, Target dan Indikator dikelompokkan ke dalam empat pilar

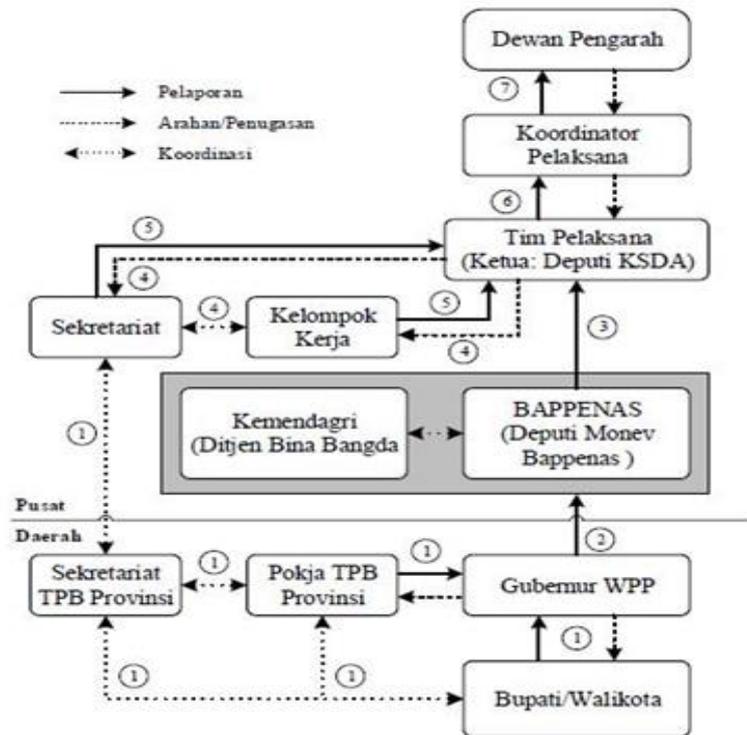


Gambar 4.1. Pemetaan Indikator Nasional dan Indikator Daerah dalam mendukung TPB

B. Mekanisme Pemantauan RAD

Berdasarkan Perpres 59/2017 pada pasal 15 ayat 1, daerah diamanatkan menyusun RAD dalam rangka pencapaian TPB/SDGs. Saat penyusunan, Gubernur bekerja bersama dengan Bupati/Walikota di wilayahnya dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak lainnya. Pada pasal 17 ayat 2 Perpres 59/2017, mengamanatkan gubernur untuk menyampaikan Laporan tahunan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri.

Alur pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti mekanisme (Gambar 4.2) sebagai berikut:



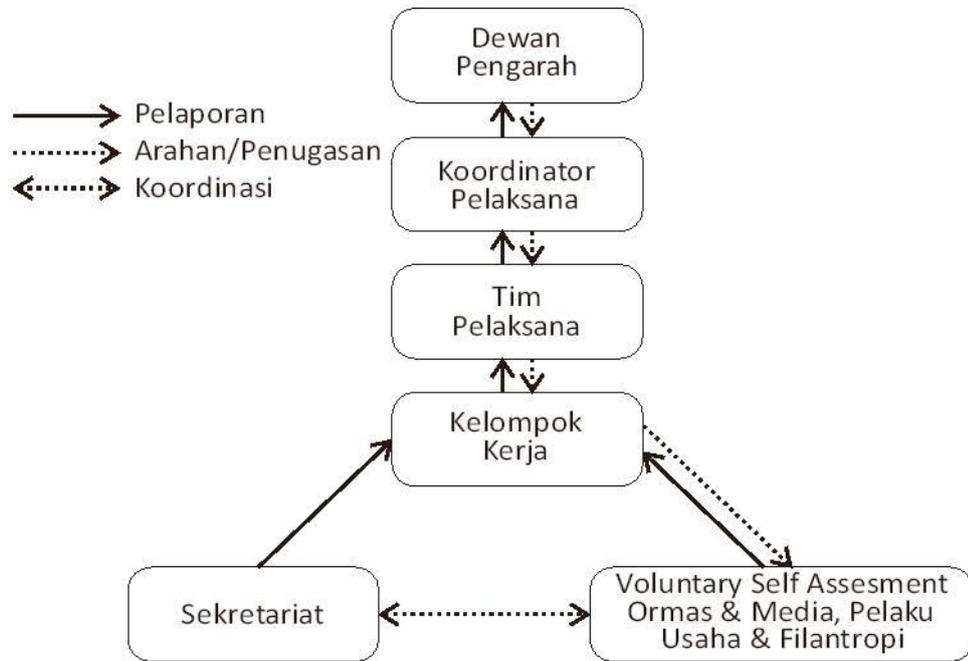
Gambar 4.2. Alur pemantauan RAD TPB/SDGs

1. **Kelompok Kerja** yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melakukan koordinasi pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi (termasuk tingkat kabupaten, dan kota bila ada) setiap enam bulan sekali. Koordinasi dilakukan terkait program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGs Provinsi kemudian melaporkan capaian RAD kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs pusat (Langkah 1).
2. **Gubernur** sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) menyampaikan laporan progress pencapaian TPB/SDGs sesuai format yang berlaku kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS. Laporan juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Langkah 2).
3. **Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS** kemudian menyampaikan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (Langkah 3).
4. **Ketua Tim Pelaksana** mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (Langkah 4).
5. **Masing-masing Kelompok Kerja** yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 5).
6. **Ketua Tim Pelaksana** melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (Langkah 6).

7. **Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS** selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden **selaku** Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017 (Langkah 7).

C. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pihak Non Pemerintah

Berbeda dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi rencana aksi program/kegiatan pemerintah, mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah dilakukan menggunakan mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assesment*). Pihak nonpemerintah meliputi organisasi kemasyarakatan, media, pelaku usaha, filantropi, serta akademisi. Perbedaan ini disebabkan karena program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), sehingga mekanisme pelaporannya pun bersifat sukarela. Sebagai catatan, meskipun bersifat sukarela, pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan format laporan melalui *self assesment tool* (SAT) yang disepakati.



Gambar 4.3 : Alur Pelaporan dalam pemantauan RAD TPB/SDGs

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak non pemerintah mengikuti langkah-langkah berikut:

1. **Organisasi non pemerintah** melakukan *voluntary self assesment* terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai format *self assesment tool*. Laporan ini kemudian disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar yang terkait dan ditembuskan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs kemudian bertugas mengkompilasi laporan dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (Langkah 1).
2. **Kelompok Kerja** dibantu oleh Sekretariat SDGs selanjutnya menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 2).

3. **Ketua Tim Pelaksana** kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana (Langkah 3).
4. **Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan** pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (Langkah 4).

Mekanisme evaluasi bagi organisasi non pemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc*. Forum ini merupakan panel independen dan nirkepentingan. Kelembagaan forum terdiri dari anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

C. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS 2017-2022

Jadwal Pemantauan dan evaluasi pencapaian TPB/SDGS 2017-2022 dilaksanakan berdasarkan Perpres 59/2017 Pasal 20. Pasal ini mengatur tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Enam bulan setelah Perpres 59/2017 berlaku, atau tepatnya 10 Januari 2018, Rencana Aksi Nasional 2017-2019 harus dapat disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGS kepada Presiden RI. Untuk tingkat daerah, RAD harus dilaporkan setelah satu tahun setelah Perpres 59/2017 diundangkan. Batas waktu penyerahan RAD TPB/SDGS provinsi adalah 10 Juli 2018. Perpres 59/2017 kemudian mengamanatkan agar *roadmap*/Peta Jalan TPB/SDGS 2017-2030 harus sudah selesai 12 bulan setelah Perpres 59/2017 diundangkan.

Sesuai dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan, pemantauan RAN dilakukan pada bulan Juli 2018 dan pemantauan RAD akan dilakukan pada Januari 2019 (atau bersamaan dengan pemantauan/evaluasi tahunan RAN). Laporan pemantauan dari Kementerian dan Lembaga serta dari Gubernur disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri 15 hari setelah akhir bulan berkenaan.

BAB V

Penutup

Rencana Aksi Daerah TPB/SDG's disusun dan berisi aksi-aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan non pemerintah secara bersama-sama. TPB berpegang pada prinsip integrasi dan *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi untuk pencapaian target setiap indikator TPB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Prinsip integrasi dalam TPB menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/*Goal* tertentu menentukan keberhasilan dari Tujuan/*Goal* lainnya. Keterkaitan antar tujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB, yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Maka, mekanisme pemantauan yang inklusif diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh Pemda maupun non pemerintah.

Pelaksanaan RAD TPB memerlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi:

1. perluasan penggunaan teknologi;
2. Penguatan kerja sama multipihak;
3. Penguatan koordinasi;
4. Peningkatan kapasitas;
5. Pemberian penghargaan kepada para pihak; serta
6. Penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Perluasan Penggunaan Teknologi. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi. Teknologi informasi juga berfungsi mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB. Baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, Pemda, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB.

Kemitraan Multipihak. Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global dan nasional, juga diterapkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB di tingkat daerah dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah Daerah, filantropi dan pelaku usaha, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditematkannya perwakilan setiap pihak dalam keanggotaan Tim Koordinasi Nasional dan Daerah TPB. Kemitraan ini memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB secara bersama.

Termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (*online*) dan luring (*offline*).

Penguatan Koordinasi. Pelaksanaan pencapaian TPB mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB di tingkat nasional dan daerah. Kementerian PPN/BAPPENAS di tingkat pusat dan BAPPEDA di tingkat daerah mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB.

Dalam aspek **kerangka hukum**, koordinasi koheren ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB) di tingkat nasional dan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota di tingkat daerah. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB serta hubungan antara pemerintah pusat, Pemda dan organisasi nonpemerintah.

Dalam aspek **substansi program**, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB. Dalam aspek pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana Pemda (APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Peningkatan Kapasitas. Untuk melaksanakan Rencana Aksi TPB di tingkat pusat dan daerah diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup Organisasi Pemda (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pemberian Penghargaan Kepada Para Pihak. Penghargaan diberikan kepada Pemda kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh Tim Koordinasi TPB.

Strategi Komunikasi. Agar TPB menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi.

Pemutakhiran Dokumen. Dokumen RAD TPB merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak Pemda dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (*online*) dan luring (*offline*). Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.